



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS KINERJA KOPERASI UNIT DESA (KUD) SETIA NAGARI SELAYO KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK

SKRIPSI



WIDYA KARNI
06 114 003

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”**.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya penulis sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc dan Ibu Rina Sari, SP, M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan petunjuk, saran dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Pertanian, Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Staf Pengajar, dan Karyawan Fakultas Pertanian yang telah memberi bantuan dan fasilitas yang berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pengurus KUD Setia beserta karyawan selaku fasilitator dalam penelitian ini serta semua pihak yang ikut memberikan bantuan kepada penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Padang, September 2011

W.K.



DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan tentang Kinerja	6
2.1.1 Pengertian Kinerja	6
2.1.2 Pengertian Pengukuran Kinerja	7
2.1.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja	7
2.2 Koperasi	8
2.2.1 Tujuan dan Jati Diri Koperasi	9
2.2.2 Fungsi dan Peran Koperasi	9
2.2.3 Prinsip Koperasi	9
2.2.4 Asas Koperasi	11
2.2.5 Landasan Koperasi	11
2.2.6 Struktur Organisasi Koperasi	12
2.2.7 Sumber Modal Koperasi	14
2.2.8 Jenis - Jenis Koperasi	15
2.2.9 Partisipasi Anggota Koperasi	16
2.3 Koperasi Unit Desa (KUD)	17

2.4	Pengukuran Kinerja Koperasi	18
2.4.1	Pengukuran Kinerja Konvensional	18
2.4.2	Pengukuran Kinerja Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	21
2.5	Kepuasan Anggota Koperasi	23
2.6	Penelitian Terdahulu	24
III. METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.2	Metode Penelitian	26
3.3	Metode Pengambilan Sampel	26
3.4	Metode Pengumpulan Data	27
3.5	Aspek dan Variabel yang Diamati	27
3.6	Analisa Data	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Sejarah Berdiri KUD Setia	39
4.2	Struktur Organisasi KUD Setia	40
4.2.1	Rapat Anggota Tahunan (RAT)	41
4.2.2	Pengurus	41
4.2.3	Badan Pengawas	42
4.2.4	Karyawan	43
4.2.5	Keanggotaan	44
4.3	Struktur Permodalan	45
4.4	Unit Usaha yang Dijalankan	47
4.4.1	Usaha RMU (<i>Rice Milling Unit</i>)	47
4.4.2	Usaha Simpan Pinjam	48
4.4.3	Usaha Penagihan Rekening Listrik dan PDAM	49
4.5	Analisis Kinerja KUD Setia	50
4.5.1	Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Organisasi	50
4.5.2	Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Tatalaksana dan Manajemen	53
4.5.3	Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Produktivitas	56
4.5.4	Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Manfaat dan Dampak	58

4.6	Penilaian Kepuasan Anggota KUD Setia	62
4.6.1	Kepuasan Anggota berdasarkan Administrasi Koperasi ..	63
4.6.2	Kepuasan Anggota berdasarkan Etos Kerja (Budaya Kerja) Pengurus	64
4.6.3	Kepuasan Anggota berdasarkan Keuangan Koperasi	66
4.6.4	Kepuasan Anggota berdasarkan Usaha Simpan Pinjam ..	67
4.6.5	Kepuasan Anggota berdasarkan Usaha RMU (Rice Milling Unit)	68
4.6.6	Kepuasan Anggota berdasarkan Penagihan Rekening Listrik dan PDAM	69
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN	75



DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1. Perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004 – 2009	3
2. Kertas Kerja Penilaian Koperasi Unit Desa (KUD)	31
3. Prestasi KUD Setia KUD Setia	40
4. Pelaksanaan RAT KUD Setia Tahun 2008 – 2010	41
5. Susunan Pengurus KUD Setia Periode 2008 – 2013	42
6. Susunan Badan Pengawas KUD Setia Periode 2008 – 2013	43
7. Kualifikasi Karyawan KUD Setia Periode 2008 – 2013	43
8. Perkembangan Jumlah Anggota KUD Setia KUD Setia Tahun 2008 – 2010	45
9. Perkembangan Modal KUD Setia Tahun 2008 – 2010	45
10. Perkembangan SHU KUD Setia Tahun 2008 – 2010	46
11. Pembagian SHU berdasarkan Anggaran Dasar KUD Setia Tahun 2010	47
12. Pendapatan dan Laba Unit Usaha RMU KUD Setia Tahun 2008 – 2010	48
13. Pendapatan dan Laba Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Setia Tahun 2008 - 2010	49
14. Pendapatan dan Laba Unit Usaha Penagihan Rekening Listrik dan PDAM KUD Setia Tahun 2008 – 2010	50
15. Pengukuran Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Organisasi Tahun 2010	53
16. Pengukuran Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Tatalaksana dan Manajemen Tahun 2010	55
17. Pengukuran Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Produktivitas Tahun 2010	58
18. Pengukuran Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Manfaat dan Dampak Tahun 2010	59
19. Rata-rata Penilaian Kinerja KUD Setia Tahun 2010	60

20.	Karakteristik Responden di KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	62
21.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Administrasi Koperasi	63
22.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Etos Kerja (Budaya Kerja) Pengurus	65
23.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Keuangan Koperasi	66
24.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Usaha Simpan Pinjam	67
25.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Usaha RMU..	68
26.	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Usaha Penagihan Rekening Listrik dan PDAM	69
27.	Penilaian Tingkat Kepuasan Anggota KUD Setia	70



DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Halaman</u>
1. Struktur Organisasi KUD Setia Tahun 2010	40



DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1. Keadaan KUD menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009	75
2. Keadaan Modal Sendiri KUD di Kabupaten Solok Tahun 2009	76
3a. Ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Per.Men.No.06/Per/M.KUKM/V/ 2006)...	77
3b. Penilaian Kinerja Berdasarkan (Per.Men.No.06/Per/M.KUKM/V/ 2006)..	78
4. Neraca per 31 Desember 2010 KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	79
5. Laporan Laba Rugi per 31 Desember 2010 KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	80
6. Rencana dan Realisasi Anggaran Biaya, Pendapatan dan SHU KUD Setia Tahun 2010	81
7. Matriks Data Set Penelitian	82
8. Saldo Donasi yang Diterima KUD Setia per 31 Desember 2010 ...	84
9. Biaya Organisasi KUD Setia tahun 2009 dan 2010	85
10a. Perhitungan Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Organisasi	86
10b. Perhitungan Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Tatalaksana dan Manajemen	87
10c. Perhitungan Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Produktivitas .	88
11. Koperasi Berprestasi di Kabupaten Solok Tahun 2011	90
12. Penilaian Kinerja KUD Setia oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Tahun Buku 2010	91
13. Indikator Penilaian Kepuasan Anggota	92
14. Identitas Responden Penelitian	94

ANALISIS KINERJA KOPERASI UNIT DESA (KUD) SETIA NAGARI SELAYO KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK

ABSTRAK

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan April - Mei 2011 di Koperasi Unit Desa (KUD) Setia yang beralamat di Desa Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Tujuan penelitian adalah mengukur kinerja KUD Setia dan mengukur kepuasan anggota KUD Setia.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Analisa data yang digunakan untuk mengukur kinerja KUD Setia adalah analisa kuantitatif dan untuk mengukur kepuasan anggotanya digunakan analisa deskriptif.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata nilai pengukuran kinerja KUD Setia berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Per.Men.No.06/M.KUKM/V/2006) terhadap aspek organisasi, aspek tatalaksana dan manajemen, aspek produktivitas dan aspek manfaat dan dampak diperoleh nilai rata-rata kinerja KUD Setia sebesar 67,08 dengan kriteria cukup baik. Berdasarkan pengukuran Tingkat Kepuasan Anggota KUD Setia terhadap administrasi koperasi, budaya kerja pengurus, keuangan koperasi, usaha RMU, usaha simpan pinjam dan usaha penagihan rekening listrik dan PDAM, diperoleh nilai rata-rata kepuasan anggota sebesar 76,55 persen dengan kriteria baik.

Guna meningkatkan kinerja pada masa akan datang, KUD Setia diharapkan melakukan kegiatan pendidikan perkoperasian pada pengelola dan anggota koperasi. Selain itu, perlu menyusun Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi dengan melibatkan anggota, sehingga sesuai dengan kebutuhan anggota demi kemajuan KUD Setia pada masa mendatang.



PERFORMANCE ANALYSIS OF KUD SETIA OF NAGARI SELAYO KECAMATAN KUBUNG, SOLOK DISTRICT

ABSTRACT

This case study aims to analyze management performance of KUD Setia and measure its member satisfaction. Performance is seen from organizational, management, productivity, and impact, based on the Act of Cooperative and Small and Medium Enterprises Ministry of the Republic of Indonesia (No.06/M.KUKM/V/2006), that Both primary and secondary data were collected in order to support the analysis.

It is found that the KUD Setia's performance is 67.08, that is categorized sufficiently good performance. The members' satisfaction is high 76.55 percent of member satisfy with KUD Setia services.

To improve performance, KUD Setia needs to send its staff for training and to educate its members on cooperative management. In addition, It has to encourage participation of the members in developing working plan and budgeting, so that KUD Setia might meet their needs.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya (Himpuni, 2008).

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional (Himpuni, 2008).

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi diharapkan mampu menjadi soko guru perekonomian Indonesia (Riani, 2007).

Secara khusus, koperasi pertanian di Indonesia terutama melalui Koperasi Unit Desa (KUD) telah mendapat tugas serta berbagai fasilitas untuk turut mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Keberadaan dan perkembangan KUD juga telah menjadi simbol dari keberadaan dan perkembangan koperasi pertanian di Indonesia serta sangat erat kaitannya dengan program dan peran pemerintah dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Secara umum KUD dinilai telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap keberhasilan

pembangunan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi, khususnya swasembada beras (Krisnamurthi, 1998).

Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk atas dasar kesamaan persepsi dan kebutuhan petani akan kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada masa yang akan datang peran koperasi di Indonesia diperkirakan akan tetap bahkan semakin penting, terutama dalam kaitannya untuk menjadi wahana pengembangan ekonomi rakyat, namun demikian koperasi juga akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Globalisasi, perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan koperasi sendiri akan menuntut koperasi untuk mampu meningkatkan peran dan fungsi usahanya jika tidak ingin tersisih oleh pelaku usaha lainnya. KUD sebagai sentral perekonomian pedesaan dihadapkan pada tantangan bagaimana untuk dapat mewujudkan KUD sebagai badan usaha yang tangguh, yang mampu menerapkan prinsip-prinsip koperasi Indonesia, dan mampu mewujudkan misinya dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Hal tersebut dapat diartikan sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja KUD (Krisnamurthi, 1998).

Pengukuran Kinerja merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang tumbuh kembang dari suatu koperasi, terutama bagi koperasi yang telah lama berdiri. Berkaitan dengan hal tersebut, koperasi perlu membenahi diri dan harus mampu melihat kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal koperasi. Pengukuran kinerja yang berorientasi pada masa depan tidak hanya memfokuskan pada aspek keuangan tetapi juga aspek non keuangan. Ukuran keuangan untuk mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan di masa lalu dan ukuran keuangan tersebut dilengkapi dengan ukuran non keuangan seperti kepuasan *customer*, produktivitas, dan *cost effectiveness* proses bisnis serta komitmen personel yang akan menentukan kinerja keuangan masa yang akan datang. Ukuran keuangan menunjukkan akibat dari berbagai tindakan yang terjadi di luar non keuangan (Himpuni, 2008).

Koperasi sebagai badan usaha memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan efektifitas kegiatan usahanya terutama efektifitas

operasional, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2001).

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah memberikan konsep tentang pengukuran kinerja koperasi, yaitu tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi (Per.Men.No.06/M.KUKM/V/2006). Berdasarkan pengukuran ini, ada empat aspek koperasi yang dinilai yaitu Aspek Organisasi, Aspek Tatalaksana dan Manajemen, Aspek Produktivitas dan Aspek Manfaat dan Dampak (Lampiran 3a).

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu bentuk kelembagaan diantara sekian banyak kelembagaan yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian (Baga, 2003). Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat bahwa perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD) di Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi dari tahun ke tahun antara lain dilihat dari jumlah KUD, jumlah anggota, Sisa Hasil Usaha (SHU) dan volume usaha. Perkembangan KUD di Propinsi Sumatera Barat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan KUD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2004 - 2009

Indikator	Tahun					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah KUD (Unit)	475	454	428	435	418	394
Jumlah Anggota KUD (Orang)	332.765	176.329	169.980	169.145	147.460	141.239
Asset (Juta Rp)	627.578,00	314.132,00	97.912,00	77.080,00	71.208,00	274.278,17
Volume Usaha (Juta Rp)	233.480,00	67.702,00	96.087,47	168.146,60	168.800,71	187.971,59
SHU (Juta Rp)	477.362,66	4.159,00	10.745,82	5.376,35	8.820,63	68.431,49

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, 2010

Berdasarkan uraian diatas, menganalisis kinerja KUD menjadi penting dilakukan. Melalui pengukuran kinerja, KUD didorong berusaha memberikan *value* yang lebih baik lagi bagi kegiatan organisasi, usaha dan meningkatkan layanan koperasi kepada anggotanya serta masyarakat, sehingga dapat mewujudkan dirinya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Solok merupakan daerah yang mempunyai jumlah anggota KUD terbesar dibandingkan daerah lainnya yaitu 26.548 orang dengan jumlah KUD sebanyak 30 unit (Lampiran 1). Ini membuktikan bahwa masyarakat di Kabupaten Solok masih memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap manfaat menjadi anggota KUD dan tentunya akan berpengaruh positif terhadap KUD seperti meningkatnya jumlah modal yang berasal dari anggota.

Koperasi Unit Desa (KUD) Setia sebagai koperasi serba usaha (*multifunction/multicommodity*) merupakan salah satu dari banyak KUD yang ada di Kabupaten Solok dan memegang peranan dalam kegiatan perekonomian pedesaan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan para anggotanya, KUD Setia menjalankan beberapa unit usaha, yaitu unit simpan pinjam, unit penagihan rekening listrik dan PDAM, dan unit RMU (*Rice Milling Unit*).

Berdasarkan wawancara dengan ketua pengurus KUD Setia, bapak Irwan Hanafi, pengukuran kinerja yang dilakukan oleh KUD Setia dilaporkan dalam buku RAT berupa laporan keuangan. Laporan tersebut terdiri dari neraca, laba rugi, serta rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan biaya.

Kaplan dan Norton (1996) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dengan menggunakan ukuran keuangan belum mampu mencerminkan keseluruhan nilai yang melekat dalam sebuah organisasi bisnis. Penilaian kinerja seperti ini memiliki beberapa kelemahan seperti ketidakmampuan mengukur kinerja harta tak tampak (*intangible asset*) dan harta intelektual perusahaan dan kinerja yang diukur secara keuangan hanya mampu bercerita mengenai masa lalu organisasi bisnis dan tidak mampu sepenuhnya menuntun mereka ke arah yang lebih baik.

Menurut Himpuni (2008), tumbuh kembang kinerja koperasi sangat ditentukan oleh anggota (*customer*). Pelayanan koperasi akan berhubungan langsung dengan kepuasan pelanggan koperasi. Peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan akan meningkatkan nilai kepuasan yang diterima oleh pelanggan koperasi. Menurut Kotler *cit* Rangkuti (2005), kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dengan yang diharapkannya. Pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan

dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Sehingga, konsep kepuasan pelanggan akan berhubungan erat dengan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pengukuran kinerja yang tidak hanya mengukur kinerja keuangan saja, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi koperasi secara lengkap, jelas dan akurat. Menurut Munawir (1989), konsep pengukuran kinerja yang menyeluruh memberikan manfaat sebagai acuan dalam penilaian kinerja keuangan yang lebih akurat, efektif dan efisien.

Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang kinerja pada KUD Setia untuk menjawab pertanyaan penelitian yang timbul, yaitu :

1. Bagaimana kinerja KUD Setia berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi (Per.Men.No.06/M.KUKM/V/2006)?
2. Bagaimana kinerja KUD Setia berdasarkan kepuasan anggotanya ?

Sehubungan dengan itu, maka peneliti memberi judul penelitian ini dengan **“Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengukur kinerja KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi (Per.Men.No.06/M.KUKM/V/2006)
2. Mengukur kepuasan anggota KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu menambah pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya tentang kinerja koperasi, sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan, perencanaan dan pengendalian aktivitas di masa mendatang demi kemajuan KUD Setia dan sebagai informasi bagi penelitian serupa atau penelitian lain yang berkaitan dengan koperasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kinerja merupakan kemampuan kerja. Berdasarkan S.K Menteri Keuangan RI No.740/KMK/1989, kinerja adalah prestasi yang dicapai dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan (Riani, 2007).

Kinerja menjadi ukuran prestasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, istilah kinerja perusahaan kerap kali disamakan dengan kondisi keuangan perusahaan yang dengan pengukuran-pengukuran keuangan mampu memberikan hasil yang memuaskan setidaknya-tidaknya bagi pemilik saham perusahaan itu maupun bagi karyawannya (Munawir, 1989).

Kinerja merupakan salah satu faktor yang penting untuk menilai keberhasilan perusahaan, penilaian kinerja juga sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya penentuan tingkat gaji karyawan maupun *reward* yang layak. Seorang manajer juga bisa menggunakan penilaian kinerja perusahaan sebagai evaluasi kerja dari periode yang lalu (Hansen dan Mowen, 1995).

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Armstrong dan Baron *cit* Wibowo, 2007). Menurut Sutara *cit* Palapa (2006), keberhasilan koperasi di masa mendatang dapat ditentukan oleh beberapa prasyarat berikut ini yaitu kesadaran akan kebutuhan anggota, pengetahuan dan pengertian dasar tentang koperasi, kejujuran dan ketulusan pengurus, staf yang jujur dan cakap, kemampuan berkembang, pasar, dan perundang-undangan.

2.1.2 Pengertian Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001). Zamkhani (1990) mendefinisikan penilaian kinerja merupakan salah satu komponen dasar dari manajemen kinerja. Ukuran kinerja didesain untuk menilai seberapa baik aktivitas dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan (Hansen dan Mowen, 1995).

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam usaha untuk mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil seperti yang diinginkan. Standar perilaku tersebut bisa berupa kebijakan manajemen ataupun rencana formal yang nantinya dituangkan dalam anggaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja tersebut dilakukan untuk menilai perilaku yang tidak semestinya dilakukan dan untuk merangsang timbulnya perilaku yang semestinya dilakukan. Rangsangan timbulnya perilaku yang semestinya dapat dilakukan dengan memberikan *reward* atas hasil kinerja yang baik (Mulyadi, 2001).

Penilaian kinerja dapat dilaksanakan oleh pihak manajemen perusahaan sendiri (*internal*) atau pihak luar (*eksternal*). Sistem pengukuran kinerja mempunyai peranan penting dalam fungsi-fungsi manajemen organisasi seperti pengendalian manajemen, manajemen aktivitas, dan sistem motivasi (Atkinson, 1995).

Manfaat pengukuran kinerja yaitu : (a) mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum, (b) membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian, (c) mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan, (d) menyediakan umpan balik bagi karyawan

mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka, dan (e) menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan (Mulyadi, 2001).

2.2 Koperasi

Latar belakang lahirnya koperasi adalah keinginan dari para pendiri koperasi yang berusaha untuk membebaskan diri dari kesulitan ekonomi secara bersama-sama. Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia dan telah memberikan inspirasi terbentuknya koperasi pertama kali di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya dan kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia (Wikipedia, 2010).

Secara harfiah koperasi berarti bekerja sama. Koperasi terdiri dari dua kata yaitu *co* yang berarti bersama dan *operation* berarti bekerja. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja sama atau bekerja bersama, dengan kata lain koperasi merupakan suatu alat untuk memperbaiki kehidupan berdasarkan menolong diri sendiri (*self help*) dan otoaktivitas dalam bentuk kerjasama. Koperasi pada dasarnya bukan merupakan perkumpulan yang mencari keuntungan semata tetapi mencari perbaikan hidup dan kesejahteraan anggotanya (Mahmud, 1986).

Mohamad Hatta memberikan definisi koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan kegotong royongan (Sukamdiyo, 1996). Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa koperasi adalah badan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2.2.1 Tujuan dan Jati Diri Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut mantan Presiden Soeharto, tujuan koperasi bukanlah untuk mendirikan usaha besar serta gedung mewah, tetapi yang jelas tugas utama koperasi adalah tetap berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Jati diri koperasi adalah berfungsinya anggota sebagai pemilik (pemodal) juga sekaligus sebagai pelanggan atau pengguna jasa perusahaan koperasi (Nasution, 2002).

2.2.2 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 4 menyebutkan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah : (a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, (b) Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, (c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, dan (d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas keluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2.3 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Prinsip koperasi merupakan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha serta menjadi ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Menurut UU RI No. 25 Tahun 1992, koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

5. Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

6. Kerjasama antar koperasi

Kerja sama dapat dilakukan antar koperasi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

7. Pendidikan perkoperasian

Pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.

2.2.4 Asas Koperasi

Azas mengandung arti dasar pemikiran untuk mencapai tujuan (Soeradjiman, 1996). Azas koperasi dalam bahasa Inggris disebut *Cooperative Principles*, yang berasal dari bahasa latin. *Principium* berarti basis atau landasan. *Principium* memiliki arti cita-cita utama atau kekuatan atau peraturan dari organisasi (Hendrojogi, 2000).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan koperasi berdasar atas azas kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan tersebut bersumber dari ketentuan lebih tinggi, yaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai badan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan". Azas kekeluargaan dalam koperasi mengandung arti kerjasama yang saling menghidupi, atau dengan kata lain tidak boleh terjadi suatu usaha merugikan atau mematikan usaha yang dijalankan oleh pihak lain.

Menurut Mohammad Hatta yang dikutip dari Soeradjiman (1996), inti pengertian dari azas kekeluargaan terletak pada rasa setia kawan (*solidaritas*) dan percaya pada diri sendiri (*individualitas*) yang mengandung arti setiap anggota memperhatikan anggota lainnya, yang kuat membantu yang lemah, masing-masing berpartisipasi dalam usaha sesuai dengan kemampuannya, kepentingan anggota lebih utama daripada kepentingan individu dan hasil usaha dibagi secara adil sesuai dengan partisipasi masing-masing anggota.

2.2.5 Landasan Koperasi

Mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya (Widiyanti, 1991).

Menurut Chaniago, dkk (1973), landasan koperasi adalah dasar atau pedoman bagi koperasi, baik dasar bagi setiap pemikiran yang akan menentukan arah tujuan koperasi maupun dasar dari kedudukan koperasi dalam struktur perekonomian bangsa dan negara. Landasan Koperasi Indonesia adalah :

1. Landasan Idiil

Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila, yang termuat dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 2. Landasan Idiil koperasi adalah dasar yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi (Anoraga, dkk, 1997). Secara ideal koperasi harus dijiwai oleh Pancasila terutama sila ke lima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

2. Landasan Struktural dan Gerak

Landasan Struktural Koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan geraknya adalah Pasal 33 Ayat 1 berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan" (Kartasapoetra, dkk, 1991). Landasan struktural adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.

3. Landasan Mental

Agar Koperasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, harus ditopang dengan sikap mental para anggotanya yaitu "setia kawan dan kesadaran pribadi" (*solidarity and individuality*). Rasa setia kawan sangat penting, karena tanpa rasa setia kawan, maka tidaklah mungkin ada kerjasama (*sense cooperation*) dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban.

2.2.6 Struktur Organisasi Koperasi

Setiap organisasi dapat menjalankan fungsinya dengan lancar sebagaimana mestinya, oleh karena itu harus mempunyai organisasi yang baik dan jelas, dengan mengetahui tugas dan kewajiban setiap organisasi masing-masing, maka tidak akan terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahaman dalam melakukan tugas pekerjaan. Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 21 menyebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

1. Rapat Anggota

Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 22, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. Hak dan suara Rapat Anggota umumnya berlaku untuk satu suara (*one man one vote*) dan tidak boleh diwakilkan (*no voting by proxy*). Hal ini dilakukan untuk mendorong anggota dalam menghadiri rapat sehingga ikut berpartisipasi dalam manajemen koperasi secara tidak langsung. Pada setiap Rapat Anggota ditetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok, yaitu bagaimana koperasi seharusnya menjalankan usahanya untuk mencapai tujuannya. Kebijakan yang ditetapkan tersebut merupakan pagar yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pelaksana kebijakan. Rapat Anggota melimpahkan wewenangnya kepada pengurus untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan berbagai keputusan lainnya dan mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus untuk menjalankan kegiatan koperasi serta kepada badan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh koperasi.

2. Pengurus

Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 29 dan pasal 30, pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus bertugas dalam : (a) mengelola koperasi dan usahanya, (b) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, (c) menyelenggarakan Rapat Anggota, (d) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan (e) memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.

3. Pengawas

Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 38 dan pasal 39, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota. Pengawas bertugas sebagai berikut : (a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi, dan (b) membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.



2.2.7 Sumber Modal Koperasi

Menurut Wikipedia (2010), seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi juga memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

3. Simpanan khusus (lain-lain)

Misalnya simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja) dan Deposito Berjangka.

4. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

5. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat.

Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak yaitu anggota dan calon anggota, koperasi lainnya atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi, bank dan lembaga keuangan bukan bank lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber lain yang sah.

2.2.8 Jenis-jenis koperasi

Menurut Suyono (1996), dalam garis besarnya ada sekian banyak jenis koperasi, tetapi dapat dibagi atas lima golongan, yaitu : (a) Koperasi produksi (koperasi penghasil), yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang dilakukan oleh koperasi maupun anggota koperasi. Koperasi ini anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa, (b) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari yang bertujuan agar anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas baik dan harga yang layak, (c) Koperasi penjualan, yaitu koperasi yang menjual barang-barang yang dihasilkan, (d) Koperasi kredit (koperasi simpan pinjam), didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Koperasi ini bertujuan untuk membantu keperluan kredit anggota yang membutuhkan dengan syarat yang ringan, mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, mendidik para anggota untuk hidup hemat dengan menyimpan sebahagian pendapatan mereka dan menambah pengetahuan anggota tentang koperasi, dan (e) Koperasi jasa, yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

Menurut Parjiman dan Djabaruddin, berdasarkan sifat kegiatan usahanya, koperasi dapat dibagi atas dua jenis, yaitu : (a) Koperasi tunggal usaha (*singlepurpose*), yaitu koperasi yang mengusahakan hanya satu macam kegiatan usaha meskipun kebutuhan para anggota dan kesempatan untuk memperluas usaha ada, dan (b) Koperasi serba usaha (*multipurpose*) yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi para anggotanya. Menurut jenjang hierarki organisasinya, koperasi terbagi atas (a) Koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan dan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya, dan (b) Koperasi sekunder, yaitu koperasi

yang beranggotakan badan - badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka bergabung untuk tujuan efisiensi dan kelayakan dalam rangka melayani para anggotanya (Anoraga dan Widiyanti, 1995).

2.2.9 Partisipasi Anggota Koperasi

Menurut Baswir (2000), setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak menjadi anggota koperasi. Tetapi karena koperasi adalah sebuah badan hukum yang akan melakukan tindakan-tindakan hukum, yang benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanyalah mereka yang mampu melakukan tindakan hukum atau tindakan koperasi dan yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu.

Menurut Hendar dan Kusnadi (2005), secara harfiah partisipasi berarti mengikutsertakan pihak lain dalam pencapaian tujuan. Partisipasi itu sendiri dibagi dalam tiga dimensi, yaitu sebagai berikut : (a) Dimensi partisipasi dipandang dari sifatnya, dapat berupa dipaksakan (*forced*) dan sukarela (*foluntary*). Partisipasi yang dipaksakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang mengedepankan semangat sukarela, (b) Dimensi partisipasi dipandang dari bentuknya dapat berupa formal dan informal. Dalam partisipasi formal biasanya telah tercipta suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan setiap kegiatan. Sementara pada partisipasi yang bersifat informal biasanya hanya dapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan dalam bidang partisipasi, (c) Dimensi partisipasi dipandang dari pelaksanaannya yang dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan secara langsung terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Pada Partisipasi tidak langsung, akan terjadi apabila ada wakil yang membawa aspirasi orang lain, misalnya karyawan atau anggota. Wakil tersebut akan berbicara atas nama karyawan atau anggota dengan kelompok yang lebih tinggi tingkatannya. Pada koperasi, partisipasi ini dapat dilakukan secara bersamaan, bergantung pada situasi dan kondisi yang berlaku di koperasi itu dan (d) Dimensi partisipasi dipandang dari

segi kepentingannya, berupa partisipasi kontributif atau partisipasi intensif. Kedua jenis partisipasi ini akan timbul jika anggota memiliki peran ganda sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Pada partisipasi kontributif, sebagai pemilik anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan dan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap berjalannya perusahaan koperasi. Pada partisipasi intensif, anggota yang juga merupakan pelanggan memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang kepentingannya.

2.3 Koperasi Unit Desa (KUD)

Pada tahun 1967 diterbitkan UU No.12/1967 tentang Pokok - Pokok Perkoperasian. Penjabaran UU No.12/1967 khususnya yang menyangkut pembangunan pedesaan dinyatakan dalam kebijaksanaan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 (Inpres No. 4/1973) tentang Pengaturan dan Pembinaan Badan Usaha Unit Desa (BUUD). BUUD ini merupakan bibit dasar KUD. Perubahan status BUUD menjadi KUD (Inpres 2/1978) menjadikan KUD bukan lagi sebagai koperasi pertanian, tetapi menjadi koperasi serba usaha. Keanggotaan menjadi terbuka bagi semua warga desa yang bidang usahanya sangat beragam, yang berarti beragam pula kebutuhannya. Hal tersebut menjadikan KUD sulit menjadi organisasi ekonomi yang profesional, karena profesionalisme memerlukan spesialisasi bukan generalisasi (Nasution, 1990).

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi unit desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa itu yang merupakan daerah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka yang beranekaragam, maka KUD itu mempunyai berbagai fungsi meliputi perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan sehari-hari, pengelolaan serta pemasaran hasil pertanian, pelayanan jasa-jasa lainnya dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya (Anoraga dan Widiyanti, 1995).

Menurut Widiyanti, dkk (2003), koperasi unit desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada sangkut paut secara langsung dalam menjalankan beberapa macam usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Menurut Sukamdiyo (1996), ada dua peranan KUD dalam pengembangan desa yaitu :

- a. Peranan primer, dalam kaitannya dengan pembangunan sektor pertanian dan kelembagaan secara operasional. Hal-hal yang tercakup dalam peranan primer adalah (1) meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga sektor ini mempunyai daya tampung lebih besar bagi lapangan kerja yang ada di pedesaan. Jika ini dapat direalisasikan, maka kesenjangan sosial dapat dikurangi, (2) mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian dimana kelemahan sistim kelembagaan pertanian dapat diminimisasi dengan hadirnya KUD, (3) menghimpun sumber daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar, dan (4) memberikan jaminan terhadap resiko yang dihadapi oleh golongan masyarakat berpendapatan rendah
- b. Peranan sekunder. Hal-hal yang tercakup dalam peranan sekunder adalah (1) KUD berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektoral di pedesaan yang dimiliki oleh kaum ekonomi lemah atau pengusaha kecil, dan (2) KUD bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat paling bawah atau paling kecil.

2.4 Pengukuran Kinerja Koperasi

2.4.1 Pengukuran Kinerja Konvensional

Menurut Ikhsan (2005), manajemen konvensional melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan ukuran keuangan, yaitu hasil laporan keuangan yang diwujudkan dalam rasio keuangan antara lain likuiditas, solvabilitas, produktivitas, dan ukuran yang lainnya. Ukuran keuangan inilah yang dengan mudah dilakukan pengukurannya, maka kinerja personel yang diukur adalah

hanya yang berkaitan dengan keuangan. Hal yang sulit diukur, diabaikan atau diberi nilai kuantitatif secara sembarang. Pengukuran kinerja konvensional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan dengan biaya standar sesuai dengan biaya dan karakteristik pusat pertanggungjawabannya. Pengukuran kinerja konvensional ini, diukur dari :

1. Ukuran Kinerja berdasar pada Laporan Keuangan

Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas (SAK No.1 : 2002). Analisa terhadap pos-pos neraca akan mengetahui gambaran tentang posisi keuangannya, sedangkan analisa terhadap laporan laba ruginya akan memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan (Munawir , 2002).

Manajemen konvensional ukuran kinerja yang biasa digunakan adalah ukuran keuangan, karena ukuran keuangan inilah yang dengan mudah dilakukan pengukurannya (Mulyadi dan J. Setiawan, 2001). Menurut Munawir (2002), ukuran keuangan yang biasa digunakan adalah rasio-rasio keuangan meliputi : (a) Rasio Likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. Rasio ini merupakan rasio aktiva lancar terhadap hutang piutang, (b) Rasio *Leverage*, yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang, (c) Rasio Aktivitas, yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya, (d) Rasio Profitabilitas, yang mengukur efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi perusahaan, (e) Rasio Pertumbuhan, yang mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya didalam pertumbuhan ekonomi dan industri dan (f) Rasio Penilaian, yang mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai dasar yang melampaui pengeluaran biaya industri.

2. Ukuran Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan

a. Anggaran dan Realisasinya

Sebagai suatu badan usaha maka koperasi dengan sendirinya harus memiliki tujuan dan prinsip ekonomi pada dirinya. Selain itu, sebagai suatu perusahaan maka pendirian dan operasinya koperasi harus menyediakan dana sebagai modal, baik untuk investasi maupun modal kerja atau modal usahanya. Dalam kaitan ini perlu disusun rencana pengeluaran atau anggaran pengeluaran, antara lain : (1) Anggaran Pendirian koperasi, seperti untuk biaya penyelenggaraan rapat, biaya transportasi, biaya penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran, dan lain-lain. Dalam pendirian perkumpulan koperasi dibutuhkan dana yang relatif tidak terlalu besar dibanding anggaran operasional, (2) Anggaran Operasional, seperti biaya pembuatan surat-surat izin, termasuk penyelesaian Badan Hukum Koperasi seta SIP (Surat Izin Perdagangan) dari Departemen Perdagangan. Selain itu tentu saja untuk modal kerja dan investasi, dan (3) Setelah perkumpulan koperasi dibentuk maka selanjutnya dibutuhkan dana guna melaksanakan misinya dan tujuan yang ditetapkan oleh rapat anggota. Untuk ini perlu disusun rencana kerja dan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi baik oleh Pengurus maupun oleh manajer (Sudarsono dan Edilius, 2002).

b. Produktivitas

Produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal, bahkan mungkin maksimal. Menurut pengukuran kinerja koperasi sesuai dengan pedoman pembinaan koperasi Dep.Kop & PPK RI No.20/PPK/1997, pengukuran produktivitas menggunakan : (1) *Asset Turn Over* (perputaran kekayaan), yaitu perbandingan rasio penjualan bersih terhadap total asset, (2) *Profit Margin* yaitu perbandingan rasio SHU terhadap total penjualan, (3) *Net Earning Power (ROI)* yaitu perbandingan antara rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset, dan (4) Rentabilitas Modal Sendiri (*ROE*) yaitu pebandingan antara rasio SHU bersih terhadap modal sendiri.

c. Efektifitas

Efektifitas koperasi merupakan tingkat keberhasilan koperasi dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan (Modul Kep.Men.KUKM,2004),

sehingga dalam penilaian ini, ukuran kinerja yang bertolak dari efektifitas koperasi adalah sejauh mana koperasi mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anggota-anggotanya dan masyarakat di sekelilingnya dengan baik, seperti pengembalian jasa yang menjadi hak anggota, pengamanan dana-dana yang berasal dari anggota, pelayanan usaha yang baik agar anggota terpuaskan.

2.4.2 Pengukuran Kinerja Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi (Per.Men.No.06/M.KUKM/V/2006), koperasi berprestasi adalah koperasi yang memiliki prestasi dalam pencapaian kinerjanya, dilihat dari aspek organisasi, aspek tatalaksana dan manajemen, aspek produktivitas, serta aspek manfaat dan dampak koperasi yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Tujuan penilaian koperasi berprestasi adalah untuk memberikan motivasi pada koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat, mengetahui kinerja koperasi dalam periode tertentu sebagai gambaran keberhasilan dalam upaya pengembangan koperasi dan mengembangkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan koperasi. Ada empat aspek koperasi yang dinilai yaitu :

- 1. Aspek Organisasi, dengan substansi penilaian, yaitu :**
 - a. Pelunasan simpanan pokok (SP) anggota, dengan ketentuan rasio simpanan pokok yang dibayar terhadap yang seharusnya dibayar lunas
 - b. Pelunasan simpanan wajib (SW) anggota, dengan ketentuan rasio simpanan wajib yang dibayar terhadap yang seharusnya dibayar lunas
 - c. Penyelenggaraan RAT, dengan ketentuan dilaksanakannya RAT tepat waktu
 - d. Rasio kehadiran anggota dalam RAT, dengan ketentuan berdasarkan quorum RAT sesuai dengan AD/ART nya
 - e. Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi, dengan ketentuan RK dan RAPB disahkan dan dilaksanakan pada RAT

- f. Rasio peningkatan jumlah anggota, dengan ketentuan adanya pertumbuhan atau peningkatan jumlah anggota,
- g. Pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi, dengan ketentuan adanya kesempatan pendidikan atau pelatihan bagi anggota secara terencana dan terealisasi
- h. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi (pengurus, pengawas dan karyawan), dengan ketentuan adanya kesempatan pendidikan atau pelatihan bagi pengurus secara terencana dan terealisasi
- i. Tersedia anggaran khusus dan Penyisihan dana pendidikan
- j. Pemeriksaan oleh badan pengawas dan KAP (Kantor Akuntan Publik)

2. Aspek Tatalaksana dan Manajemen, dengan substansi penilaian, yaitu :

- a. Rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota, dengan ketentuan perbandingan jumlah anggota tercatat dengan jumlah anggota sebenarnya
- b. Realisasi anggaran pendapatan koperasi, dengan ketentuan rasio realisasi anggaran pendapatan terhadap rencana anggaran pendapatan
- c. Realisasi anggaran belanja koperasi, dengan ketentuan rasio realisasi anggaran belanja terhadap rencana anggaran belanja
- d. Realisasi surplus hasil usaha koperasi, dengan ketentuan rasio realisasi anggaran SHU terhadap rencana anggaran SHU
- e. Keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota, dengan ketentuan rasio usaha yang dikelola koperasi terkait dengan usaha anggota terhadap koperasi
- f. Penerangan dan penyuluhan, dengan ketentuan melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan
- g. Media informasi
- h. Sarana kantor dan usaha koperasi

3. Aspek Produktivitas, dengan substansi penilaian, yaitu :

- a. Rentabilitas modal sendiri, dengan ketentuan penilaian rasio SHU terhadap modal sendiri
- b. *Return On Asset (ROA)*, dengan ketentuan penilaian rasio SHU terhadap asset

- c. *Asset Turn Over (ATO)*, dengan ketentuan penilaian rasio penjualan terhadap asset
 - d. Kemampuan menghasilkan laba (*net profit margin*), dengan ketentuan penilaian rasio SHU terhadap penjualan
 - e. *Current Ratio*, dengan ketentuan penilaian rasio aktiva lancar terhadap passiva lancar
 - f. Total hutang (kewajiban) terhadap asset,
 - g. Total hutang (kewajiban) terhadap modal sendiri,
 - h. Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota, dengan ketentuan penilaian rasio transaksi anggota pada koperasi terhadap seluruh transaksi koperasi
 - i. Perputaran piutang, dengan ketentuan kemampuan koperasi dalam menagih piutang
4. **Aspek Manfaat dan Dampak, dengan substansi penilaian, yaitu :**
- a. Kerjasama usaha secara vertikal, dengan ketentuan penilaian kerjasama antar koperasi primer dan koperasi sekunder
 - b. Kerjasama usaha secara horizontal, dengan ketentuan penilaian kerjasama antar koperasi
 - c. Kerjasama usaha dengan Badan Usaha (BU) lainnya
 - d. Manfaat kerjasama, dengan ketentuan meningkatkan efisiensi volume usaha
 - e. Penyerapan tenaga kerja
 - f. Pembayaran pajak, cukai/ retribusi
 - g. Dana sosial

2.5 Kepuasan Anggota Koperasi

Kepuasan pelanggan secara harfiah punya makna tetap, yaitu suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi (Swasembada, 2007). Menurut Kotler *cit* Rangkuti (2005), kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dengan yang diharapkannya. Sehingga, konsep kepuasan pelanggan akan berhubungan erat dengan kinerja perusahaan.

Melihat perkembangan sistem informasi yang saat ini semakin canggih dan mutakhir, setiap orang dapat dengan mudah dan leluasa mendapatkan informasi

yang dinginkannya. Sehingga dari informasi yang didapat, konsumen akan selalu menginginkan pelayanan yang lebih baik dari pada yang pernah didapatkannya. Untuk memenangkan persaingan, koperasi harus mampu memberikan kepuasan bagi anggotanya karena jika tidak, anggota dalam kurun waktu tertentu akan beralih kepada penyedia jasa yang lain. Kondisi seperti ini sesuai dengan yang ditulis di dalam majalah Swasembada (2007) bahwa kepuasan konsumen akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Fenomena seperti ini akan memberikan pengaruh terhadap persepsi pelanggan kepada pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan kepadanya.

Menurut Abdilla (2009), dalam mengukur kepuasan anggota pada KUD Giri Tani bidang peternakan sapi perah menggunakan variabel-variabel seperti administrasi koperasi, etos kerja pengurus, keuangan koperasi, distribusi susu, penjualan konsentrat ternak, dan bantuan medis ternak. Penelitian Putra (2006) dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kabupaten Garut menggunakan variabel yang dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu : (a) Unit Usaha Simpan Pinjam, terdiri atas prosedur memperoleh kredit, ketepatan waktu dalam memperoleh kredit, ketepatan jumlah dalam memperoleh kredit, dan tingkat sukubunga pinjaman yang ditetapkan oleh KOPTI, (b) Unit Usaha Pengadaan Kedelei, terdiri atas ketepatan kualitas dalam memperoleh kedelei, ketepatan jumlah dalam memperoleh kedelei, kecukupan jatah kedelei dari koperasi, harga jual kedelei oleh koperasi, ketepatan waktu dalam memperoleh kedelei, kesopanan dan keramahan petugas, pengetahuan petugas mengenai informasi yang diperlukan anggota, kecepatan petugas memberikan pelayanan, cara pembayaran kedelei, lokasi/jarak pelayanan anggota, kenyamanan tempat pelayanan dan jam buka pelayanan, (c) Unit Usaha Warung Serba Ada (Waserda), terdiri atas mutu bahan pembantu dan alat produksi yang disediakan, dan harga bahan pembantu dan alat produksi yang disediakan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Amzah (2001), menganalisis Kinerja Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Padang berdasarkan Laporan Keuangan, menyatakan bahwa kinerja KUD (1995–1999) pada rasio likuiditas berada dalam keadaan likuid, dimana KUD

mampu membayar hutang lancarnya dengan aktiva lancarnya, pada rasio solvabilitas juga berada dalam keadaan solvabel, dimana KUD dapat menjamin kewajiban dengan total aktiva yang dimilikinya. Sedangkan rasio rentabilitas masih rendah karena kemampuan KUD untuk mendapatkan keuntungan dari aktiva atau modal juga kecil dan rasio aktivitas terus menurun dari tahun ketahun yang tercermin dari perputaran modal usaha yang belum menunjukkan kemampuan yang baik.

Hertiningsih (2006), menganalisis Perkembangan Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Panampung Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam, melalui kinerja keuangannya selama tahun 2000-2004 menunjukkan bahwa KUD dalam keadaan likuid, dimana KUD mampu membayar hutang lancarnya dengan aktiva lancarnya tetapi tidak solvabel (tidak menguntungkan) karena kemampuan untuk menjamin hutang dengan modal sangat rendah. Rasio rentabilitas masih rendah karena masih rendahnya kemampuan KUD untuk mendapatkan keuntungan dan rasio aktivitasnya rendah karena tidak efisiennya dalam penggunaan aktiva yang diinvestasikan untuk meningkatkan penjualan.

Riani (2007), meneliti Kinerja Koperasi berdasarkan Kep.Men.No. 129/KEP/M/KUKM/XI/2002, Hambatan, Permasalahan, dan Implementasinya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia se-Kabupaten Pemalang, menunjukkan bahwa para pengurus KPRI masih menggunakan ukuran rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dalam pengukuran kinerja yaitu sebanyak 58.125% disebabkan kurangnya pengetahuan pengurus, 52.5% kurangnya pendidikan dan motivasi pengurus serta 57.5% kurangnya pemahaman pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi. Hal ini terjadi karena sebanyak 56.25% KPRI menganggap Dinas Koperasi tidak pernah mensosialisasikan aturan kinerja koperasi, 41.5% KPRI menganggap Dinas Koperasi tidak pernah mensosialisasikan pengukuran kinerja koperasi dan 46.5% KPRI menganggap Dinas Koperasi tidak pernah mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada pengurus koperasi. Jika diukur berdasarkan Kep.Men.No.129/KEP/M/KUKM/XI/2002, KPRI se-Kabupaten Pemalang berada dalam kategori cukup baik yaitu pada interval 67,05.

(Arikunto, 2002). Jumlah anggota KUD Setia pada tahun 2010 adalah sebanyak 172 orang. Menurut Arikunto (2002), jika subjek penelitian besar dari 100, maka dapat diambil jumlah sampel sebanyak 20% dari populasi karena dinilai sudah mewakili. Jadi, jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 34 orang responden.

3.4. Metode Pengumpulan data

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus, karyawan dan badan pengawas KUD Setia. Selain itu, data primer juga diperoleh dari anggota KUD Setia yang menjadi responden dengan menggunakan kuesioner.
2. Data Sekunder merupakan data yang tersedia pada instansi dalam bentuk arsip, laporan, maupun dokumentasi, data primer yang telah diolah dan diajukan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain (Umar, 2002). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat berupa data keadaan KUD di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok berupa data keadaan KUD di Kabupaten Solok, dokumentasi dari KUD Setia, data yang berasal dari hasil penelitian terdahulu, dan literatur-literatur dari internet.

3.5. Aspek dan Variabel yang Diamati

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian penelitian (Arikunto, 2002). Untuk tujuan pertama yaitu mengukur kinerja KUD Setia, terlebih dahulu di deskripsikan tentang gambaran umum KUD Setia, meliputi sejarah berdiri KUD Setia, struktur organisasi, struktur permodalan dan unit usaha yang dijalankan dan

Pada pengukuran kinerja KUD Setia berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang

pedoman penilaian koperasi berprestasi (Per.Men.No.06/M.KUKM/V/2006), ada empat aspek yang diamati, yaitu :

1. Aspek Organisasi

- a. Pelunasan Simpanan Pokok (SP) anggota, data yang dikumpulkan meliputi Jumlah SP yang telah dibayar pada tahun 2010 dan jumlah SP yang seharusnya lunas pada tahun 2010
- b. Pelunasan Simpanan Wajib (SW) anggota, data yang dikumpulkan meliputi Jumlah SW yang telah dibayar pada tahun 2010 dan jumlah SW yang seharusnya lunas pada tahun 2010
- c. Penyelenggaraan RAT tahun 2010 (waktu diadakan RAT)
- d. Rasio kehadiran anggota dalam RAT tahun 2010, data yang dikumpulkan meliputi jumlah kehadiran anggota dalam RAT dan syarat quorum RAT sesuai AD/ART KUD
- e. Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi tahun 2010
- f. Rasio peningkatan jumlah anggota, data yang dikumpulkan meliputi jumlah anggota tahun 2010 dan jumlah anggota tahun 2009
- g. Adanya pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi
- h. Adanya pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi (pengurus, pengawas dan karyawan)
- i. Tersedia anggaran khusus dan penyisihan dana pendidikan
- j. Pemeriksaan oleh badan pengawas dan KAP (Kantor Akuntan Publik)

2. Aspek Tatalaksana dan Manajemen

- a. Rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota, data yang dikumpulkan meliputi jumlah anggota tercatat tahun 2010 dan jumlah anggota seluruhnya
- b. Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi, data yang dikumpulkan meliputi Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi tahun 2010 dan Rencana Anggaran Pendapatan Koperasi tahun 2010
- c. Realisasi Anggaran Belanja Koperasi, data yang dikumpulkan meliputi Realisasi Anggaran Belanja Koperasi tahun 2010 dan Rencana Anggaran Belanja Koperasi tahun 2010

- d. Realisasi Hasil Usaha Koperasi, data yang dikumpulkan meliputi Realisasi Hasil Usaha Koperasi tahun 2010 dan Rencana Hasil Usaha Koperasi tahun 2010
- e. Keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota, data yang dikumpulkan meliputi usaha yang dikelola koperasi terkait dengan usaha anggota dan jumlah usaha koperasi
- f. Penerangan dan penyuluhan
- g. Media informasi
- h. Sarana kantor dan usaha koperasi

3. Aspek Produktivitas

- a. Rentabilitas Modal Sendiri, data yang dikumpulkan meliputi sisa hasil usaha koperasi tahun 2010 dan modal sendiri koperasi tahun 2010
- b. *Return On Asset (ROA)*, data yang dikumpulkan meliputi sisa hasil usaha koperasi tahun 2010 dan asset (aktiva) koperasi tahun 2010
- c. *Asset Turn Over (ATO)*, data yang dikumpulkan meliputi penjualan koperasi tahun 2010 dan asset koperasi tahun 2010
- d. Kemampuan menghasilkan laba (*net profit margin*), data yang dikumpulkan meliputi sisa hasil usaha koperasi tahun 2010 dan penjualan (pendapatan) koperasi koperasi tahun 2010
- e. *Current Ratio*, data yang dikumpulkan meliputi aktiva lancar koperasi koperasi tahun 2010 dan passiva lancar koperasi koperasi tahun 2010
- f. Total Hutang (kewajiban) terhadap Asset, data yang dikumpulkan meliputi total hutang koperasi koperasi tahun 2010 dan total asset koperasi koperasi tahun 2010
- g. Total Hutang (kewajiban) terhadap Modal Sendiri, data yang dikumpulkan meliputi total hutang koperasi koperasi tahun 2010 dan modal sendiri koperasi koperasi tahun 2010
- h. Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota, data yang dikumpulkan meliputi transaksi anggota terhadap koperasi tahun 2010 dan total transaksi koperasi seluruhnya tahun 2010
- i. Perputaran piutang, data yang dikumpulkan meliputi penjualan (pendapatan) koperasi tahun 2010 dan saldo piutang (tahun 2009 dan tahun 2010).

4. Aspek Manfaat dan Dampak

- a. Kerjasama usaha secara vertikal (jumlah kerjasama yang dilakukan)
- b. Kerjasama usaha secara horizontal
- c. Kerjasama usaha dengan Badan Usaha (BU) lainnya
- d. Manfaat kerjasama
- e. Penyerapan tenaga kerja
- f. Pembayaran pajak, cukai/ retribusi
- g. Dana sosial

Tujuan kedua yaitu mengukur kepuasan anggota KUD Setia. Variabel yang diamati dalam mendeskripsikan kepuasan anggota adalah :

1. Administrasi koperasi, meliputi kemudahan proses menjadi anggota, pencatatan data anggota oleh koperasi dan pelaksanaan Rapat Anggota
2. Etos kerja (budaya kerja pengurus), meliputi keramahan pengurus melayani anggota, kecepatan menanggapi keluhan, ketepatan menanggapi keluhan, dan penampilan (kerapian) pengurus
3. Keuangan koperasi, data yang dikumpulkan yaitu pembagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota
4. Usaha simpan pinjam, meliputi prosedur memperoleh kredit, waktu dalam memperoleh kredit, jumlah kredit yang diterima dan tingkat suku bunga yang ditetapkan
5. Usaha RMU, meliputi biaya yang dikeluarkan jika menggunakan RMU di KUD, mutu beras yang dihasilkan dan jam operasional unit usaha RMU
6. Usaha penagihan rekening listrik dan PDAM yaitu manfaat yang diperoleh dengan adanya unit usaha penagihan rekening listrik dan PDAM.

3. 5. Analisa Data

Pada tujuan pertama, digunakan analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran umum KUD Setia dan analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur kinerja KUD Setia. Pengukuran kinerja KUD Setia dilakukan sesuai kertas kerja berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Per.Men.No.06/M.KUKM/V/2006) yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kertas Kerja Penilaian Kinerja KUD

ASPEK DAN VARIABEL	CARA PERHITUNGAN DAN SKOR	BOBOT
ASPEK ORGANISASI		
1. Pelunasan simpanan pokok (SP) anggota	$\frac{\text{Jumlah SP yang dibayar}}{\text{Jumlah SP yang seharusnya lunas}} \times 100\%$ <p>Kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 100%, nilai = 100 80% s/d < 100%, nilai = 75 60% s/d < 80%, nilai = 50 40% s/d < 60%, nilai = 25 < 40%, nilai = 0 	3
2. Pelunasan simpanan wajib (SW) anggota	$\frac{\text{Jumlah SW yang dibayar}}{\text{Jumlah SW yang seharusnya lunas}} \times 100\%$ <p>Kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 100%, nilai = 100 80% s/d < 100%, nilai = 75 60% s/d < 80%, nilai = 50 40% s/d < 60%, nilai = 25 < 40%, nilai = 0 	3
3. Penyelenggaraan RAT	<p>Bagi koperasi primer, RAT dilaksanakan pada bulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Januari s/d maret, nilai = 100 April, nilai = 75 Mei, nilai = 50 Juni, nilai = 25 Diatas Juni, nilai = 0 <p>Bagi koperasi sekunder, RAT dilaksanakan pada bulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Januari s/d Juni, nilai = 100 Juli, nilai = 75 Agustus, nilai = 50 September, nilai = 25 Diatas September, nilai = 0 	3
4. Rasio kehadiran anggota dalam RAT	<p>Jumlah kehadiran anggota dalam RAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memenuhi quorum, nilai = 100 Memenuhi quorum setelah ada penundaan, nilai = 75 Memenuhi quorum setelah ada penundaan kedua, nilai = 50 Tidak memenuhi quorum, tetapi melaksanakan RAT, nilai = 25 Tidak memenuhi quorum dan tidak melaksanakan RAT, nilai = 0 	3
5. Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan sebahagian, nilai = 75 RK dan RAPB disahkan RA dan tetapi tidak dilaksanakan, nilai = 50 	3

	d. RK dan RAPB belum atau tidak disahkan, nilai = 25 e. RK dan RAPB belum atau tidak disahkan RA dan tidak dilaksanakan, nilai = 0	
6. Rasio peningkatan jumlah Anggota	<p> $\frac{\text{Jumlah anggota thn ini} - \text{jumlah anggota thn sblnnya}}{\text{jumlah anggota tahun sebelumnya}} \times 100\%$ </p> <p>Kriteria :</p> a. Meningkat $\geq 10\%$, nilai = 100 b. Meningkat $5\% \leq < 10\%$, nilai = 75 c. Meningkat $< 5\%$, nilai = 50 d. Tidak ada peningkatan (tetap) atau jika terjadi penurunan jumlah anggota karena suatu alasan dan memenuhi ketentuan AD dan ART koperasi, nilai = 25 e. Terjadi penurunan jumlah anggota akibat pemberhentian anggota yang tidak memenuhi ketentuan AD dan ART koperasi, nilai = 0	3
7. Pendidikan dan pelatihan Bagi anggota	a. Tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebahagian, nilai = 75 c. Tidak tertuang dalam program tetapi melaksanakan, nilai = 50 d. Tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 25 e. Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan, nilai = 0	3
8. Pendidikan dan Pelatihan bagi pengelola koperasi (pengurus, pengawas dan karyawan)	a. Tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebahagian, nilai = 75 c. Tidak tertuang dalam program tetapi melaksanakan, nilai = 50 d. Tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 25 e. Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan, nilai = 0	3
9. Tersedia anggaran dan Penyisihan dana pendidikan	a. Tersedia anggaran dan ada penyisihan dana pendidikan, nilai = 100 b. Tidak tersedia anggaran dan bersedia menyisihkan dana pendidikan, nilai = 75 c. Tersedia anggaran dan tidak bersedia menyisihkan dana pendidikan, nilai = 50 d. Tidak tersedia anggaran tetapi ada pengeluaran untuk dana pendidikan, nilai = 25 e. Tidak tersedia anggaran maupun penyisihan dana pendidikan, nilai = 0	3
10. Pemeriksaan	<p>Pemeriksaan internal</p> a. Ada pemeriksaan oleh pengawas dan ada laporan hasil pemeriksaan secara tertulis dan lengkap, nilai = 100 b. Ada pemeriksaan oleh pengawas dan ada laporan hasil pemeriksaan secara tertulis tetapi tidak lengkap,	2

	<p>nilai = 75</p> <p>c. Ada pemeriksaan oleh pengawas, tetapi laporan digabung dengan laporan pengurus, nilai = 50</p> <p>d. Ada pemeriksaan oleh pengawas tetapi tidak ada laporan hasil pemeriksaan, nilai = 25</p> <p>e. Tidak ada pemeriksaan oleh pengawas, nilai = 0</p> <p>Pemeriksaan eksternal oleh KAP</p> <p>a. Wajar tanpa catatan, nilai = 100</p> <p>b. Wajar dengan catatan, nilai 75</p> <p>c. Disklaimer, nilai = 50</p> <p>d. Non opinion, nilai = 25</p> <p>e. Tidak ada pemeriksaan oleh KAP/KJA, nilai = 0</p>	2
Jumlah Bobot pada Aspek Organisasi		31
ASPEK TATALAKSANA DAN MANAJEMEN		
1. Rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota	<p>$\frac{\text{Jumlah anggota tercatat}}{\text{Jumlah anggota seluruhnya}} \times 100\%$</p> <p>Kriteria :</p> <p>a. 80% s/d 100%, nilai = 100</p> <p>b. 60% s/d < 80%, nilai = 75</p> <p>c. 40% s/d < 60%, nilai = 50</p> <p>d. 20% s/d < 40%, nilai = 25</p> <p>e. < 20%, nilai = 0</p>	3
2. Realisasi anggaran pendapatan koperasi	<p>$\frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan koperasi}}{\text{Rencana Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$</p> <p>Kriteria :</p> <p>a. $\geq 100\%$, nilai = 100</p> <p>b. 80% s/d < 100%, nilai = 75</p> <p>c. 60% s/d < 80%, nilai = 50</p> <p>d. 40% s/d < 60%, nilai = 25</p> <p>e. < 40%, nilai = 0</p>	3
3. Realisasi anggaran belanja koperasi	<p>$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja koperasi}}{\text{Rencana Anggaran Belanja}} \times 100\%$</p> <p>Kriteria :</p> <p>a. $\leq 100\%$, nilai = 100</p> <p>b. > 100% s/d 110%, nilai = 75</p> <p>c. > 110% s/d 120%, nilai = 50</p> <p>d. > 120% s/d 130%, nilai = 25</p> <p>e. > 130%%, nilai = 0</p>	3
4. Realisasi hasil usaha koperasi	<p>$\frac{\text{Realisasi Hasil Usaha koperasi}}{\text{Rencana Hasil Usaha}} \times 100\%$</p> <p>Kriteria :</p> <p>a. $\geq 100\%$, nilai = 100</p> <p>b. 80% s/d < 100%, nilai = 75</p> <p>c. 60% s/d < 80%, nilai = 50</p> <p>d. 40% s/d < 60%, nilai = 25</p> <p>e. < 40%, nilai = 0</p>	3

5. Keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota	<p><u>Usaha yg dikelola koperasi terkait dgn usaha anggota</u> x 100% Jumlah Usaha Koperasi</p> <p>Kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 90% s/d 100% , nilai = 100 75% s/d < 90%, nilai = 75 60% s/d < 75%, nilai = 50 45% s/d < 60%, nilai = 25 < 45%, nilai = 0 	3
6. Penerangan dan penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> Tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebahagian, nilai = 75 Tidak tertuang dalam program tetapi melaksanakan, nilai = 50 Tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 25 Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan, nilai = 0 	3
7. Media informasi	<ol style="list-style-type: none"> Tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebahagian, nilai = 75 Tidak tertuang dalam program tetapi melaksanakan, nilai = 50 Tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 25 Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan, nilai = 0 	3
8. Sarana kantor dan usaha koperasi	<ol style="list-style-type: none"> Milik sendiri, nilai = 100 Sewa/ kontrak, nilai = 75 Hibah, nilai = 50 Pinjaman, nilai = 25 Numpang, nilai = 0 	3
Jumlah Bobot pada Aspek Tatalaksana dan Manajemen		24
ASPEK PRODUKTIVITAS		
1. Rentabilitas modal sendiri	<p><u>Sisa Hasil Usaha</u> x 100% Modal Sendiri</p> <p>Kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> ≥ 21%, nilai = 100 15% s/d < 21%, nilai = 75 9% s/d < 15%, nilai = 50 3% s/d < 9%, nilai = 25 < 3%, nilai = 0 	3
2. Return On Asset (ROA)	<p><u>Sisa Hasil Usaha</u> x 100% Aktiva</p> <p>Kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> ≥ 10%, nilai = 100 7% s/d < 10%, nilai = 75 	3

	c. 3% s/d < 7%, nilai = 50 d. 1% s/d < 3%, nilai = 25 e. < 1%, nilai = 0	
3. <i>Asset Turn Over</i> (ATO)	$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva}} \times 1 \text{ kali}$ <p>Kriteria :</p> a. $\geq 3,5$ kali, nilai = 100 b. 2,5 kali s/d < 3,5 kali, nilai = 75 c. 1,5 kali s/d < 2,5 kali, nilai = 50 d. 1 kali s/d < 1,5 kali, nilai = 25 e. < 1 kali, nilai = 0	3
4. Kemampuan menghasilkan laba (net profit margin)	$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$ <p>Kriteria :</p> a. $\geq 15\%$, nilai = 100 b. 10% s/d < 15%, nilai = 75 c. 5% s/d < 10%, nilai = 50 d. 1% s/d < 5%, nilai = 25 e. < 1%, nilai = 0	3
5. <i>Current Ratio</i> (Rasio Lancar)	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Passiva Lancar}} \times 100\%$ <p>Kriteria :</p> a. 200% s/d 250%, nilai = 100 b. 175% s/d < 200% atau > 250% - 275%, nilai = 75 c. 150% s/d < 175% atau > 275% - 300%, nilai = 50 d. 125% s/d < 150% atau > 300% - 325%, nilai = 25 e. < 125% atau > 325%, nilai = 0	3
6. Rasio Hutang (kewajiban) terhadap Total Aktiva (RHTA)	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$ <p>Kriteria :</p> a. $\leq 40\%$, nilai = 100 b. > 40% - 50%, nilai = 75 c. > 50% - 60%, nilai = 50 d. > 60% - 80%, nilai = 25 e. > 80%, nilai = 0	3
7. Rasio Hutang (kewajiban) terhadap Modal Sendiri (RHMS)	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$ <p>Kriteria :</p> a. $\leq 70\%$, nilai = 100 b. > 70% - 100%, nilai = 75 c. > 100% - 150%, nilai = 50 d. > 150% - 200%, nilai = 25 e. > 200%, nilai = 0	3
8. Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota	$\frac{\text{Transaksi anggota terhadap koperasi}}{\text{Total transaksi seluruhnya}} \times 100\%$	3

9. Perputaran piutang	<p>Kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 90%, nilai = 100 75% s/d < 90%, nilai = 75 60% s/d < 75%, nilai = 50 45% s/d < 60%, nilai = 25 < 45%, nilai = 0 $\frac{\text{Penjualan}}{\frac{1}{2} \text{ saldo piutang (thn sebelumnya + thn saat ini)}} \times 100\%$ <p>Kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 90%, nilai = 100 75% s/d < 90%, nilai = 75 60% s/d < 75%, nilai = 50 45% s/d < 60%, nilai = 25 < 45%, nilai = 0 	3
Jumlah Bobot pada Aspek Produktivitas		27
ASPEK MANFAAT DAN DAMPAK		
1. Kerjasama usaha secara vertikal	<ol style="list-style-type: none"> ≥ 5 koperasi atau jenis kerjasama, nilai = 100 4 koperasi atau jenis kerjasama, nilai = 75 3 koperasi atau jenis kerjasama, nilai = 50 1 – 2 koperasi atau jenis kerjasama, nilai = 25 Tidak ada kerjasama, nilai = 0 	3
2. Kerjasama usaha secara horizontal	<ol style="list-style-type: none"> ≥ 5 koperasi atau jenis kerjasama, nilai = 100 4 koperasi atau jenis kerjasama, nilai = 75 3 koperasi atau jenis kerjasama, nilai = 50 1 – 2 koperasi atau jenis kerjasama, nilai = 25 Tidak ada kerjasama, nilai = 0 	3
3. Kerjasama usaha dengan badan usaha (BU) lainnya	<ol style="list-style-type: none"> ≥ 5 BU atau jenis kerjasama, nilai = 100 4 BU atau jenis kerjasama, nilai = 75 3 BU atau jenis kerjasama, nilai = 50 1 – 2 BU atau jenis kerjasama, nilai = 25 Tidak ada kerjasama, nilai = 0 	2
4. Manfaat kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan efisiensi dan pelayanan koperasi kepada anggota, nilai = 100 Meningkatkan volume usaha dan daya saing koperasi, nilai = 75 Sudah sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh anggota, nilai = 50 Belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh anggota, nilai = 25 Tidak berdampak bagi anggota, nilai = 0 	3
5. Penyerapan tenaga kerja	<p>Bagi koperasi yang memiliki volume usaha < Rp. 500 juta per tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyerap ≥ 5 orang, nilai = 100 Menyerap 4 orang, nilai = 75 Menyerap 2 – 3 orang, nilai = 50 Menyerap 1 orang, nilai = 25 Tidak menyerap, nilai = 0 	2

	<p>Bagi koperasi yang memiliki volume usaha > Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar per tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyerap > 10 orang, nilai = 100 Menyerap 7 s/d 10 orang, nilai = 75 Menyerap 4 s/d < 7 orang, nilai = 50 Menyerap 2 s/d < 4 orang, nilai = 25 Menyerap < 2 orang, nilai = 0 <p>Bagi koperasi yang memiliki volume usaha > Rp. 1 milyar per tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyerap ≥ 20 orang, nilai = 100 Menyerap 15 s/d , < 20 orang, nilai = 75 Menyerap 10 s/d < 15 orang, nilai = 50 Menyerap 5 s/d < 10 orang, nilai = 25 Menyerap < 5 orang, nilai = 0 	
6. Pembayaran pajak, cukai/ retribusi	<ol style="list-style-type: none"> Membayar seluruh kewajiban pajak, cukai/ retribusi, nilai = 100 Membayar sebahagian besar kewajiban pajak, cukai/ retribusi, nilai = 75 Membayar sebahagian kecil kewajiban pajak, cukai/ retribusi, nilai = 50 Membayar lebih kecil dari 25% kewajiban pajak, cukai/ retribusi, nilai = 25 Tidak pernah membayar pajak, cukai/ retribusi, nilai = 0 	2
7. Dana sosial	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia dan telah diberikan kepada yang berhak, nilai = 100 Tersedia dan hanya sebahagian yang diberikan kepada yang berhak, nilai = 75 Tidak tersedia, tetapi memberikan dana bantuan sosial, nilai = 50 Tersedia tetapi tidak/ belum diserahkan kepada yang berhak, nilai = 25 Tidak tersedia dan tidak diberikan pada yang berhak, nilai = 0 	3
Jumlah Bobot pada Aspek Manfaat dan Dampak		18
TOTAL BOBOT		100

Keterangan :

Skor (100) untuk jawaban sangat baik, skor (75) untuk jawaban baik, skor (50) untuk jawaban cukup baik, skor (25) untuk jawaban kurang baik dan skor (0) untuk jawaban tidak baik.

Untuk memperoleh bobot tiap-tiap variabel, dilakukan dengan cara berikut :

$$\frac{\text{Skor yang diperoleh pada variabel} \times \text{Bobot pada variabel}}{\text{Total bobot}}$$

Untuk memperoleh rata-rata bobot tiap-tiap aspek, dilakukan dengan cara berikut:

$$\frac{\text{Jumlah bobot yang diperoleh pada aspek} \times \text{Total bobot}}{\text{Total bobot pada aspek}}$$

Nilai Bobot yang diperoleh digunakan untuk mengelompokkan kriteria kinerja dalam empat kategori, yaitu : (a) Bobot yang diperoleh antara 85 – 100, berarti kinerja koperasi sangat baik, (b) Bobot yang diperoleh antara 70 – 84, berarti kinerja koperasi baik, (c) Bobot yang diperoleh antara 55 – 69, berarti kinerja koperasi cukup baik, dan (d) Bobot yang diperoleh antara 0 – 55, berarti kinerja koperasi kurang baik.

Pada tujuan kedua digunakan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diamati. Menurut Suprianto (2006), penilaian tingkat kepuasan anggota diukur berdasarkan skala likert yang sengaja dirancang untuk memungkinkan responden menjawab dalam berbagai tingkatan pada setiap butir pertanyaan. Penetapan skor kepuasan adalah skor (1) untuk jawaban sangat tidak puas, skor (2) untuk jawaban tidak puas, skor (3) untuk jawaban cukup puas, skor (4) untuk jawaban puas, dan skor (5) untuk jawaban sangat puas.

Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan ditentukan frekuensinya dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah responden

Untuk mencari tingkat kepuasan responden digunakan rumus berikut :

$$TKR = \frac{\text{Rata - rata skor}}{5} \times 100\%$$

TKR = Tingkat Kepuasan Responden

Arikunto (2002), mengemukakan kriteria jawaban responden sebagai berikut:

Jika TKR berkisar antara 76% - 100% = Baik

Jika TKR berkisar antara 56% - 75,99% = Cukup Baik

Jika TKR berkisar antara 0% - 55,99 % = Kurang Baik

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Berdirinya KUD Setia

Koperasi Unit Desa (KUD) Setia didirikan tanggal 22 September 1962 oleh Ahmad Khatib, Hizkil Thala, Agus Sutan Saripado dan Kaimar Kael melalui sebuah musyawarah dengan para ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan tokoh pemuda atau pelajar Desa Sawah Sudut Nagari Selayo dengan nama Koperasi Desa Setia Sawah Sudut Selayo yang disingkat dengan "KODESSA" dan berkedudukan di Desa Sawah Sudut Selayo. KODESSA didaftarkan di Departemen Koperasi Kabupaten Solok dan disahkan dengan badan hukum nomor 278/BH-XVII/63 tanggal 20 Juli 1963 yang bergerak di bidang usaha konsumsi (menyediakan kebutuhan bahan pokok yaitu minyak tanah dan gula) dengan wilayah kerja meliputi Kenagarian Selayo. Pada pendirian pertama ini, KODESSA memiliki jumlah anggota sebanyak 200 orang dengan kewajiban anggota yaitu membayar simpanan pokok Rp 250 per orang dan simpanan wajib Rp 50 per orang.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 tanggal 18 Desember 1967, KODESSA mempunyai badan hukum yang baru dengan nomor 278/BH-XVII-XII-67 tanggal 25 Juli 1968. Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pembina Binmas Provinsi Sumatera Barat No. 86/Kpts/Binmas/1973 tanggal 31 Maret 1973, KODESSA disahkan sebagai Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Pada tanggal 16 Januari 1974, KODESSA berganti nama menjadi KUD Setia Selayo dan memperoleh badan hukum dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi dengan nomor 278A/BH-XVII-XII-67 tanggal 7 Maret 1974. Sejak ditetapkan sebagai KUD, maka kegiatan usahanya bukan hanya pada bidang usaha konsumsi saja, tetapi melakukan kegiatan serba usaha. Pada tahun 1976, KUD mengajukan anggaran dasar dalam rangka pengembangan wilayah kerja yaitu pada Kenagarian Selayo, Kenagarian Gantung Ciri dan Kenagarian Koto Hilalang, dan memperoleh hak badan hukum yang baru dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi dengan nomor 278B/BH-XVII-XII-67 tanggal 28 Maret 1976. Tumbuh kembang KUD Setia dilihat dari prestasi sejak pertama didirikan hingga mendapat predikat sebagai KUD Mandiri, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Prestasi KUD Setia

No.	Tahun	Prestasi
1.	1974	KUD Setia terpilih sebagai Koperasi Primer Terbaik I di Sumatera Barat oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	1979	KUD Setia termasuk dalam lima besar KUD Model di Provinsi Sumatera Barat
3.	1980	Mendapat surat tanda klasifikasi A dari Kakandep Koperasi Kabupaten Solok sebagai KUD Model terbaik di Kabupaten Solok
4.	1979/1980	KUD terbaik II tingkat Nasional
5.	1992	KUD Setia ditetapkan sebagai KUD Mandiri berdasarkan SK Menteri Koperasi RI No.1182/KEP/M/VIII/1992 tanggal 6 Agustus 1992

Sumber : KUD Setia, 2010

4.2 Struktur Organisasi

Organisasi koperasi dibentuk atas kepentingan dan kesepakatan anggota pendirinya dan memiliki tujuan utama untuk lebih mensejahterakan anggotanya. Perangkat organisasi KUD Setia sesuai dengan UU No.25/1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur, yaitu Rapat Anggota (RAT), Pengurus, dan Pengawas. Struktur organisasi KUD Setia disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi KUD Setia Tahun 2010

Keterangan :

- > Garis Perintah
 - - - - -> Garis Tanggungjawab

Sumber : KUD Setia, 2010

4.2.1 Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi RAT dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Pelaksanaan RAT KUD Setia disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pelaksanaan RAT KUD Setia Tahun 2008 - 2010

No.	Tahun	Pelaksanaan RAT	Hasil Keputusan RAT
1.	2008	12 Maret 2009	Disetujuinya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi tahun 2009
2.	2009	1 Maret 2010	Disetujuinya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi tahun 2010 Menetapkan program kerja tahun 2010
3.	2010	23 Febuari 2011	Disetujuinya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi tahun 2011

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2008 – 2010

Dari Tabel 4, pelaksanaan RAT KUD Setia sangat baik karena setiap tahun KUD Setia selalu menyelenggarakan RAT tepat waktu, yaitu tidak melewati dari bulan Maret. RAT tersebut dapat terlaksana karena jumlah kehadiran anggota dalam RAT selalu memenuhi quorum, yaitu paling sedikit 50% dari jumlah anggota pada tahun yang bersangkutan, sehingga hasil keputusan RAT dapat disahkan.

4.2.2 Pengurus

Anggaran Dasar (AD) KUD Setia menetapkan pengurus dipilih dari anggota dan oleh anggota dengan persyaratan sebagai berikut : (a) tidak pernah terlibat pidana berdasarkan keputusan pengadilan, (b) tidak memiliki tunggakan simpanan dan tunggakan hutang pada koperasi yang bersangkutan, dan (c) memiliki pengetahuan di bidang perkoperasian. Proses pemilihan pengurus dilakukan sekali lima tahun dalam RAT. Setiap anggota memiliki hak menyampaikan satu nama sebagai kandidat, dan kandidat yang memiliki suara terbanyak berturut-turut akan diangkat sebagai ketua, sekretaris dan bendahara. Bagi pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali sebagai calon pengurus sesuai keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pada 26 April 2008, KUD Setia telah mengangkat pengurus, dan badan pengawas untuk periode 2008 – 2013. Susunan pengurus KUD Setia disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Susunan Pengurus KUD Setia Periode 2008 - 2013

No	Jabatan	Nama	Pendidikan Terakhir	Usia (tahun)	Tugas	Pekerjaan Sampingan
1.	Ketua	Irwan Hanafi	S1	49	Mengurus dan memantau jalannya organisasi koperasi dan semua kegiatan (unit usaha) yang ada di koperasi	Dagang
2.	Sekretaris	Masthur	D3	40	Bertugas dalam hal surat menyurat dan administrasi koperasi	Pegawai Koperasi Telkom
3.	Bendahara	Yusmarni Yetti	SMA	56	Bertanggungjawab terhadap keuangan dan pembukuan koperasi	Dagang

Sumber : KUD Setia, 2010

Dari Tabel 5, diketahui bahwa pengurus KUD Setia sudah menempuh jenjang pendidikan S1, sehingga diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuannya untuk kemajuan KUD Setia. Pengurus KUD Setia juga memiliki pekerjaan sampingan selain mengurus KUD, sehingga pengurus tidak setiap hari berada di KUD. Kegiatan menjalankan unit usaha yang ada di KUD langsung dijalankan oleh karyawan yang sudah mempunyai tugas masing-masing pada usaha KUD dan nantinya karyawan akan melaporkan hasil kerja mereka kepada pengurus melalui rapat pada minggu pertama setiap bulannya.

4.2.3 Badan Pengawas

Badan pengawas berasal dari anggota dan diangkat oleh anggota pula. Proses pemilihan badan pengawas dilakukan bersamaan dengan pemilihan pengurus dengan cara dan persyaratan yang sama untuk masa jabatan lima tahun. Bagi badan pengawas yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali sebagai calon badan pengawas sesuai keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Susunan badan pengawas KUD Setia disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Susunan Badan Pengawas KUD Setia Periode 2008 - 2013

No	Jabatan	Nama	Usia (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Tugas
1.	Ketua	Bsy. Sutan Jambi	55	SMA	Ketiga badan pengawas bertugas memantau dan memeriksa kelancaran organisasi dan usaha KUD sekali 3 bulan dan pada akhir tahun dilaporkan secara tertulis
2.	Anggota	Sobiran Maludin	48	SMA	
3.	Anggota	Alidjar	50	SMA	

Sumber : KUD Setia, 2010

4.2.4 Karyawan

Karyawan KUD Setia berasal dari anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dengan persyaratan yang sama dengan pengurus dan pengawas untuk masa jabatan lima tahun. Bagi karyawan yang sudah habis masa kerjanya, bisa diangkat kembali atau tetap menjadi anggota KUD. KUD Setia memiliki lima orang karyawan dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 7. Kualifikasi Karyawan KUD Setia Periode 2008 - 2013

No	Nama	Bidang Pekerjaan	Usia (Tahun)	Pendidikan Terakhir
1.	Eka Yurniati	Sub Akuntansi	34	SMA
2.	Mursida	Kasir	39	SMA
3.	M.Dinar Dini	Tata Usaha dan Penagihan Listrik dan PDAM	45	STM
4.	Yokho Ilham	Penagihan Listrik dan PDAM	36	SMA
5.	Zainal Abidin	Kabag Pengoperasian dan Opertor RMU, dan Penanggungjawab Keselamatan Harta Benda milik KUD	47	SMP

Sumber : KUD Setia Tahun 2010

Dari Tabel 7, diketahui bahwa latar belakang pendidikan karyawan KUD Setia sebahagian besarnya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau STM sebanyak empat orang dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) satu orang. Usia karyawan rata-rata antara 34 – 47 tahun, hal ini merupakan potensi untuk dapat meningkatkan kinerja dan disiplin karena usia karyawan termasuk pada usia produktif dan diharapkan dapat menunjang perkembangan KUD Setia.

4.2.5 Keanggotaan

Keanggotaan KUD Setia bersifat sukarela dan terbuka. Setiap warga yang berada di wilayah kerja KUD Setia dapat menjadi anggota KUD tanpa paksaan dari siapapun, dengan melakukan beberapa persyaratan yaitu *Pertama*, mengisi formulir pendaftaran, *Kedua*, menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp 10.000, *Ketiga*, menyetorkan simpanan wajib sebesar Rp 5.000, *Keempat*, melampirkan foto kopi KTP serta pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar.

Manfaat yang akan diperoleh anggota KUD Setia berupa manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Manfaat ekonomi yang diperoleh yaitu berupa penerimaan SHU sesuai dengan tingkat partisipasinya dan manfaat sosial berupa peningkatan hubungan kekerabatan sesama anggota maupun perangkat organisasi KUD Setia.

Pada awal tahun 2008, KUD Setia melakukan pendaftaran ulang kembali anggotanya dan diperoleh jumlah anggota sebanyak 509 orang. Sejak saat itu, dalam Anggaran Dasar (AD) nya, KUD Setia tidak lagi mengatur klasifikasi pencatatan keanggotaannya berdasarkan anggota aktif dan anggota pasif secara tertulis. Menurut pengurus, yang dikatakan anggota KUD Setia merupakan anggota aktif, yaitu anggota yang telah melakukan pendaftaran ulang pada tahun 2008 dan tercatat telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar jumlah yang ditentukan pada tahun yang bersangkutan dan berhak mendapatkan SHU serta diundang dalam RAT.

Anggota pasif merupakan anggota yang telah mendaftar ulang pada tahun 2008, tetapi tidak melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar jumlah yang ditentukan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan simpanan yang lainnya tidak mencukupi untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut. Anggota pasif hanya sekedar tercatat namanya saja sebagai anggota, sedangkan pada akhir tahun buku mereka tidak mendapatkan SHU dan tidak diundang dalam RAT. Bagi anggota pasif yang ingin menjadi anggota, harus melunasi dulu simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah ditentukan pada tahun yang bersangkutan. Perkembangan jumlah anggota KUD Setia disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Jumlah Anggota KUD Setia Tahun 2008 - 2010

No.	Tahun	Jumlah Anggota (orang)	Persentase (%)
1.	2008	159	-
2.	2009	161	1,26
3.	2010	172	6,83

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2008 – 2010

Dari Tabel 8, diketahui bahwa jumlah anggota KUD Setia selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan pengurus, hal ini disebabkan karena bertambahnya keinginan anggota untuk memperoleh pinjaman modal dari KUD Setia.

4.3 Struktur Permodalan

Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) KUD Setia, modal terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan donasi. Besaran simpanan pokok yaitu Rp 10.000 per anggota yang dibayar setiap tahunnya dan dapat dilakukan dalam dua kali angsuran. Sementara simpanan wajib Rp 5.000 per anggota yang dibayarkan setiap bulan kemudian dicatat dalam buku simpanan yang terdapat pada KUD dan buku simpanan yang dipegang oleh anggota.

Modal pinjaman KUD berasal dari simpanan anggota, simpanan non anggota, pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya dan merupakan kewajiban yang harus dibayar pada periode yang telah ditentukan. Perkembangan modal KUD Setia disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perkembangan Modal KUD Setia Tahun 2008 - 2010

No.	Modal dan SHU (Rp)	Tahun		
		2008	2009	2010
1.	Simpanan pokok	Rp. 3.243.300	Rp. 3.998.300	Rp. 4.367.300
2.	Simpanan wajib	Rp. 13.926.553	Rp. 15.767.402	Rp. 21.161.286
3.	Simpanan anggota	Rp. 13.929.908	Rp. 14.342.559	Rp. 16.695.426
4.	Dana cadangan	Rp. 14.545.154	Rp. 14.545.154	Rp. 35.006.335
5.	Donasi	Rp.170.074.084	Rp. 195.551.584	Rp.195.551.584

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban KUD Setia, 2008 – 2010

Berdasarkan Tabel 9, dapat dilihat bahwa perkembangan modal KUD Setia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah anggota, sehingga pemasukan modal yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan anggota juga bertambah.

Dana cadangan KUD Setia diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri. Dana ini disimpan dan digunakan untuk menutupi kerugian koperasi bila diperlukan. Pada tahun 2010, jumlah dana cadangan KUD Setia bertambah karena jumlah SHU yang dihasilkan pada tahun 2009 besar, sehingga penyisihan dana cadangan juga bertambah, selain itu juga karena adanya penambahan pendapatan dari penjualan saham Bank Bukopin.

Modal yang berasal dari donasi diperoleh dari bantuan Inkud Jakarta, Kanwil Koperindag Kota Padang dan Kenedy Round. Pada tahun 2009, KUD Setia mendapatkan tambahan donasi dari BKD Provinsi Sumatera Barat (Lampiran 8). Berdasarkan wawancara dengan pengurus, hibah yang diterima KUD diberikan dalam bentuk sejumlah uang dan bersifat tidak mengikat, maksudnya donasi diberikan secara penuh, tanpa adanya pengembalian dari pihak KUD, tetapi pihak KUD Setia harus memberikan laporan perkembangan usaha berupa laporan keuangan kepada dinas Koperindag Kabupaten Solok setiap tahunnya.

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi biaya-biaya dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Perkembangan jumlah SHU yang diperoleh KUD Setia disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perkembangan SHU KUD Setia Tahun 2008 - 2010

No.	Tahun	Jumlah SHU
1.	2008	Rp. 5.081.222
2.	2009	Rp. 22.424.853
3.	2010	Rp. 8.309.105

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban KUD Setia, 2008 – 2010

Dari Tabel 10, diketahui bahwa jumlah SHU pada tahun 2010 mengalami penurunan disebabkan karena biaya organisasinya bertambah dari tahun sebelumnya (Lampiran 9). Pada tahun 2010, KUD melakukan peminjaman uang sebesar Rp 50.000.000 sebagai tambahan modal usaha kepada BPD, dimana KUD

harus membayar biaya-biaya seperti beban bunga, biaya asuransi, biaya administrasi, provisi, biaya notaris dan pajak kredit BPD Penurunan SHU juga disebabkan karena keuntungan yang diterima dari unit usaha RMU yang dijalankan KUD berkurang dari tahun sebelumnya (Tabel 12). Penjelasan tentang pembagian SHU KUD Setia disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Pembagian SHU Berdasarkan Anggaran Dasar KUD Setia Tahun 2010

No.	Keterangan	Persentase
1.	Cadangan	25%
2.	Anggota	50%
3.	Dana Pendidikan	5%
4.	Dana Pengurus dan Badan Pengawas	10%
5.	Dana Karyawan	5%
6.	Dana Sosial	2.5%
7.	Dana Pembangunan Daerah Kerja	2.5%

Sumber : Anggaran Dasar KUD Setia, 2010

Tabel 11. menunjukkan bahwa tidak semua SHU yang diperoleh dibagikan ke anggota. Menurut Himpuni (2008), SHU yang dibagikan ke anggota sebanding dengan jasa, maksudnya adalah SHU yang dibagikan ke anggota berdasarkan tingkat keaktifan dan partisipasi anggota terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh KUD, baik usaha maupun organisasi.

4.4 Unit Usaha yang Dijalankan

4.4.1 Usaha RMU (*Rice Milling Unit*)

Usaha ini merupakan kegiatan penerimaan jasa penggilingan padi, baik kepada anggota maupun non anggota di wilayah kerja KUD Setia. Pada unit usaha ini, KUD memperkerjakan satu orang karyawan sebagai operator RMU yang bertanggungjawab atas pengoperasian mesin giling padi. Unit usaha ini buka pada hari kerja KUD, yaitu hari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 10.00 – 17.00 WIB. Setiap penggilingan padi 70 kg, baik anggota maupun non anggota mengeluarkan 4,5 kg beras untuk KUD dan dedak hasil penggilingan padi merupakan milik pelanggan. Penjelasan tentang pendapatan unit usaha ini disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Pendapatan dan Laba Unit Usaha RMU KUD Setia Tahun 2008 - 2010

No.	Tahun	Pendapatan RMU	Laba Bersih
1.	2008	Rp.60.254.000	Rp.24.478.700
2.	2009	Rp.68.952.000	Rp.33.312.100
3.	2010	Rp.49.725.000	Rp.19.210.600

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban KUD Setia, 2008 – 2010

Dari Tabel 12, dapat dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh dari usaha RMU berfluktuasi tiap tahunnya. Pendapatan usaha ini diperoleh dari hasil penjualan beras yang diterima KUD kepada pedagang beras di pasar. Pada tahun 2010, pendapatan jasa RMU mengalami penurunan dari Rp 68.952.000 menjadi Rp 49.725.000. Berdasarkan wawancara dengan pengurus, hal ini disebabkan karena adanya persaingan dengan RMU lain yang juga berada pada wilayah kerja KUD dan memberikan kelebihan pelayanan yaitu bukanya setiap hari dan adanya layanan jasa penjemuran padi. Selain itu, kebanyakan pelanggan memilih jasa penggilingan padi didasarkan pada jauh atau dekatnya lokasi penggilingan.

4.4.2 Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam pada KUD Setia bertujuan untuk membantu anggota yang kesulitan dalam modal usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup anggota serta memperkuat peranan dan fungsi KUD dalam perekonomian pedesaan. Berikut syarat - syarat melakukan peminjaman pada KUD Setia.

- Setiap permohonan pinjaman harus diketahui oleh istri/ suami/ ahli waris dan kepala jorong/ wali nagari,
- Bunga pinjaman yang ditetapkan KUD Setia adalah sebesar 1,5% per bulan, setiap realisasi pinjaman dikenakan biaya administrasi 1% dari pokok pinjaman dan simpanan usaha 1% pokok pinjaman,
- Bagi peminjam yang terlambat membayar pinjamannya sesuai periode yang ditetapkan, dikenakan sanksi denda sebesar 5% dari pokok pinjaman,
- Bagi peminjam yang tercatat sebagai anggota KUD Setia, jumlah maksimal pinjaman yang diberikan adalah Rp 5.000.000, dengan ketentuan setiap peminjaman di atas satu juta rupiah, harus disertai dengan memberikan jaminan pada KUD seperti bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau berupa

alat-alat rumah tangga seperti televisi, kulkas, mesin cuci. Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 12 bulan,

- e. Pinjaman hanya diberikan sebagai tambahan modal usaha dan bagi anggota yang memiliki hutang pada KUD, tidak dapat diberikan pinjaman,
- f. Bagi peminjam yang berasal dari non anggota KUD Setia, jumlah maksimal pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 500.000, dengan ketentuan harus melakukan pencicilan setiap minggunya dan harus lunas dalam jangka 10 minggu.

Perkembangan pendapatan dan laba usaha unit simpan pinjam pada KUD Setia disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Pendapatan dan Laba Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Setia Tahun 2008 – 2010

No.	Tahun	Pendapatan	Laba Bersih
1.	2008	Rp. 7.655.450	Rp. 5.667.250
2.	2009	Rp.10.280.700	Rp. 9.075.000
3.	2010	Rp.17.314.300	Rp.16.048.200

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban KUD Setia Tahun 2008 - 2010

Dari Tabel 13, dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh dari unit simpan pinjam selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan pengurus, hal ini dikarenakan prosedur peminjaman yang tidak sulit serta bunga pinjaman yang relatif rendah.

4.4.3 Usaha Penagihan Rekening Listrik dan PDAM

Unit usaha ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat disekitar lokasi KUD baik anggota maupun non anggota untuk membayar rekening listrik dan PDAM. Kerjasama KUD dengan PLN dan PDAM dilakukan dengan *system fee* yaitu memberikan jasa bagi koperasi sebesar Rp 500 per rekening yang terjual setiap bulannya.

Berdasarkan keputusan RAT, mulai tahun 2009 setiap pelanggan yang melakukan pembayaran rekening listrik atau PDAM dikenakan biaya sebesar Rp 1000 per rekening setiap bulannya. Penagihan rekening PLN dan PDAM dimulai pada tanggal 6 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Bagi pelanggan yang melewati tanggal yang telah ditentukan, dikenakan denda sebesar Rp 3.000 per rekening. Jumlah pelanggan penagihan listrik di KUD Setia berjumlah 973 rekening dan

PDAM berjumlah 415 rekening. Untuk lebih jelas mengenai pendapatan unit usaha ini disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Pendapatan dan Laba Usaha Penagihan Rekening Listrik dan PDAM KUD Setia Tahun 2008 - 2010

No.	Tahun	Pendapatan		Laba Bersih
		Listrik	PDAM	
1.	2008	Rp.12.824.000	Rp. 2.514.050	Rp. 3.057.350
2.	2009	Rp.28.292.950	Rp. 6.423.600	Rp.19.197.700
3.	2010	Rp.29.016.650	Rp.16.874.790	Rp.24.742.277

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban KUD Setia, 2008 - 2010

Dari Tabel 14, dapat dilihat bahwa pada tahun 2009, laba yang diperoleh KUD Setia meningkat dari Rp 3.057.350 menjadi Rp 19.197.700. Ini juga akan meningkatkan jumlah SHU KUD Setia. Berdasarkan wawancara dengan pengurus, hal ini juga disebabkan karena jumlah pelanggan unit usaha ini bertambah dari tahun ketahun.

4.5 Analisis Kinerja KUD Setia

4.5.1 Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Organisasi

Dari data Pengukuran Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Organisasi yang disajikan pada Tabel 15, dapat dilihat bahwa pelunasan Simpanan Pokok (SP) Anggota KUD Setia berada pada kriteria baik karena sebesar 85,80% simpanan pokok yang seharusnya lunas telah dibayar anggota. Dari 509 orang anggota, jumlah simpanan pokok yang seharusnya lunas adalah Rp 5.090.000. Jumlah simpanan pokok yang dibayar anggota adalah Rp 4.367.300. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 a.

Meskipun pelunasan simpanan pokok anggota berada pada kriteria baik, namun simpanan pokok anggota ini belum dapat digunakan untuk modal usaha KUD Setia karena jumlah nominalnya yang kecil. Indikator pelunasan simpanan pokok tidak bisa dijadikan dasar penilaian prestasi koperasi, karena walaupun tidak ada anggota yang menunggak simpanan pokok, bukan berarti kinerja di koperasi tersebut baik.

Pelunasan Simpanan Wajib (SW) Anggota KUD Setia berada pada kriteria cukup baik karena sebesar 69,29% simpanan wajib yang seharusnya lunas telah dibayar anggota. Dari 509 anggota, jumlah simpanan wajib yang seharusnya lunas adalah Rp 30.540.000. Jumlah simpanan wajib yang dibayar anggota adalah Rp 21.161.286. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 a. Jika dilihat dari jumlah nominalnya, simpanan wajib KUD Setia dinilai sudah dapat digunakan untuk modal usaha, sehingga diharapkan semua anggota koperasi dapat melunasi simpanan wajibnya.

KUD Setia merupakan sebuah koperasi primer karena merupakan perkumpulan dari orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan telah menyelenggarakan RAT pada 23 Febuari 2011 sehingga penyelenggaraan RAT nya berada pada kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan RAT telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang semestinya.

Rasio kehadiran anggota dalam RAT KUD Setia berada dalam kriteria sangat baik karena memenuhi quorum rapat. Quorum rapat KUD Setia adalah paling sedikit 50% dari jumlah anggota pada tahun yang bersangkutan, sehingga RAT dapat dilaksanakan dan disahkan, tetapi terpenuhinya quorum tersebut belum disertai oleh kesadaran anggota untuk memberikan saran dan aspirasi yang akan bermanfaat bagi kemajuan KUD. Melihat keadaan tersebut, indikator kehadiran anggota dalam RAT tidak bisa dijadikan dasar penilaian prestasi koperasi.

Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi berada dalam kriteria sangat baik karena RK dan RAPB disahkan dalam RA dan dilaksanakan seluruhnya. Pada tahun 2010, KUD Setia memiliki rencana kerja yaitu memberikan hadiah kepada anggota yang memiliki simpanan terbanyak seperti kain sarung, handuk atau berupa uang tunai. Hal tersebut sudah sesuai dengan anggaran dasar KUD Setia yang ditetapkan pada saat RAT bahwa RAPB dan RK harus disahkan dan dilaksanakan sepenuhnya, namun Rencana Kerja dan RAPB hanya disusun oleh pengurus sebagai kewajiban setiap tahunnya tanpa melibatkan anggota dalam penyusunannya.

Rasio peningkatan jumlah anggota KUD Setia berada pada kriteria baik karena mengalami peningkatan sebesar 6,83%. Ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah anggota KUD Setia dari tahun sebelumnya. Jumlah anggota

tahun 2010 adalah 172 orang dan tahun 2009 adalah 161 orang. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 a. Dengan adanya peningkatan jumlah anggota, KUD Setia dapat menambah jumlah modal yang berasal dari simpanan anggota, sehingga dapat memperkuat permodalan KUD.

KUD Setia tidak mempunyai program menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan pengelola (pengurus, pengawas dan karyawan) nya, sehingga berada dalam kriteria tidak baik karena tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakannya, sedangkan anggaran dan penyisihan dana pendidikan berada dalam kriteria sangat baik karena anggaran tersedia dan ada penyisihan dana pendidikan yaitu 5% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh.

Anggaran tersebut digunakan untuk pengurus, pengawas atau karyawan yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, karena penyisihan dana pendidikan tersebut belum mencukupi untuk melaksanakan pelatihan dan pendidikan sendiri yang disebabkan karena perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang kecil, namun ini menunjukkan adanya inisiatif yang baik dari KUD Setia dalam rangka menunjang kesuksesan pelaksanaan program pendidikan, dimana dalam Undang-undang koperasi juga disebutkan bahwa sisa hasil usaha akan dipersentasikan untuk alokasi dana pendidikan, dana sosial dan SHU yang dibagikan kepada anggota.

Pemeriksaan internal berada pada kriteria sangat baik karena ada pemeriksaan oleh badan pengawas dan ada laporan hasil pemeriksaan secara tertulis dan lengkap. Hal ini sudah sesuai dengan teori bahwa pemeriksaan laporan keuangan sangat penting dalam proses perencanaan, pengendalian, serta proses transaksional untuk pengelolaan koperasi (Riani, 2007).

Pada pemeriksaan eksternal oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) berada pada kriteria tidak baik karena tidak ada pemeriksaan oleh KAP. Hasil Pengukuran Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Organisasi pada tahun 2010 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Pengukuran Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Organisasi Tahun 2010

ASPEK ORGANISASI	HASIL	SKOR	BOBOT	KRITERIA
1. Pelunasan Simpanan Pokok (SP) Anggota	85,80%	75	2,25	Baik
2. Pelunasan Simpanan Wajib (SW) Anggota	69,29%	50	1,50	Cukup baik
3. Penyelenggaraan RAT	RAT dilaksanakan pada 23 Febuari 2011	100	3,00	Sangat baik
4. Rasio Kehadiran Anggota dalam RAT	Memenuhi quorum	100	3,00	Sangat baik
5. RK dan RAPB Koperasi	RK dan RAPB disahkan dan dilaksanakan seluruhnya	100	3,00	Sangat baik
6. Rasio Peningkatan Jumlah Anggota	Meningkat 6,83%	75	2,25	Baik
7. Pendidikan dan Pelatihan bagi Anggota	Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan	0	0,00	Tidak baik
8. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengelola Koperasi	Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan	0	0,00	Tidak baik
9. Anggaran khusus dan Penyisihan Dana Pendidikan	Tersedia anggaran dan ada penyisihan dana pendidikan	100	3,00	Sangat baik
10. Pemeriksaan	<u>Pemeriksaan internal</u> Ada pemeriksaan oleh pengawas dan ada laporan hasil pemeriksaan secara tertulis dan lengkap	100	2,00	Sangat baik
	<u>Pemeriksaan eksternal oleh KAP/KJA</u> Tidak ada pemeriksaan oleh KAP/KJA	0	0,00	Tidak baik
JUMLAH			20,00	
Rata-rata Bobot Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Organisasi			64,52	Cukup Baik

4.5.2 Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Tatalaksana dan Manajemen

Dari data pengukuran kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Tatalaksana dan Manajemen yang disajikan pada Tabel 16, dapat dilihat bahwa rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota dan telah ditandatangani oleh anggota KUD Setia berada pada kriteria sangat baik karena rasionya adalah 100%. Hal ini sesuai dengan teori bahwa dalam menjalankan administrasi sebuah

organisasi koperasi harus secara berkala dan dilakukan pencatatan keanggotaan dalam daftar buku anggota secara tertib. Ini berarti koperasi melaksanakan sehat organisasi yaitu suatu struktur organisasi koperasi haruslah disusun sesuai sudut organisasi formal (Soedjono, 1997). Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10b.

Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi berada pada kriteria sangat baik karena realisasinya adalah 106,79%. Ini terjadi karena jumlah realisasi anggaran pendapatan KUD Setia lebih besar 6,79% dari rencana anggaran pendapatannya. Jumlah rencana anggaran pendapatan KUD Setia adalah Rp 105.750.000 dan realisasi anggaran pendapatannya adalah Rp 112.930.740. Dengan demikian, KUD Setia telah melaksanakan rencana anggaran pendapatan dengan baik sesuai tujuannya karena pendapatan yang telah dianggarkan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 b.

Realisasi Anggaran Belanja Koperasi berada pada kriteria baik karena realisasinya adalah 106,45%. Ini terjadi karena jumlah realisasi anggaran belanja KUD Setia hanya lebih besar 6,45% dari rencana anggaran belanjanya. Realisasi anggaran belanja KUD Setia adalah Rp 105.443.883 dan rencana anggaran belanjanya Rp 99.055.000. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 b.

Realisasi Hasil Usaha Koperasi berada pada kriteria sangat baik karena realisasinya adalah 124,11%. Ini terjadi karena jumlah realisasi hasil usaha KUD Setia lebih besar 24,11% dari rencana hasil usahanya. Realisasi hasil usaha KUD Setia adalah Rp 8.309.105 dan rencana hasil usahanya Rp 6.695.000. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 b.

Keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota berada pada kriteria cukup baik karena keterkaitannya adalah 66,67%. Dalam menjalankan usahanya, KUD Setia hanya memiliki tiga unit usaha, yaitu usaha simpan pinjam, usaha RMU (penggilingan padi), dan usaha penagihan rekening listrik dan PDAM. Unit usaha RMU (penggilingan padi) dan usaha simpan pinjam merupakan usaha yang terkait (berhubungan) dengan usaha anggota karena sebahagian besar anggota KUD Setia mempunyai usaha dibidang pertanian dan perdagangan, sehingga dengan adanya unit usaha tersebut, dapat membantu mereka dalam menjalankan usahanya. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 b.

KUD Setia tidak menyelenggarakan program penerangan dan penyuluhan, baik kepada anggota maupun masyarakat sehingga berada pada kriteria tidak baik karena tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakannya. Ini terjadi karena tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan penerangan dan penyuluhan dari KUD, sehingga anggota hanya mengikuti kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh instansi seperti Dinas Koperasi.

Ketersediaan media informasi berada pada kriteria cukup baik karena tidak tertuang dalam program tapi ada mempunyai media informasi, seperti papan pengumuman yang berisikan informasi tentang waktu pelaksanaan rapat, waktu pembayaran penagihan rekening listrik dan PDAM. Sarana kantor dan usaha koperasi berada pada kriteria sangat baik karena merupakan milik sendiri seperti bangunan kantor, bangunan RMU, gudang, lantai jemur, perlengkapan kantor kantor dan mesin gilingan padi. Hasil pengukuran kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Tatalaksana dan Manajemen pada tahun 2010 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Pengukuran Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Tatalaksana dan Manajemen Tahun 2010

ASPEK TATALAKSANA DAN MANAJEMEN	HASIL	SKOR	BOBOT	KRITERIA
1. Rasio Pencatatan Keanggotaan dalam Buku Daftar Anggota	100%	100	3,00	Sangat baik
2. Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi	106,79%	100	3,00	Sangat baik
3. Realisasi Anggaran Belanja Koperasi	106,45%	75	2,25	Baik
4. Realisasi Hasil Usaha Koperasi	124,11%	100	3,00	Sangat baik
5. Keterkaitan Usaha Koperasi dengan Usaha Anggota	66,67%	50	1,50	Cukup baik
6. Penerangan dan Penyuluhan	Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan	0	0,00	Tidak baik
7. Ketersediaan Media Informasi	Tidak tertuang dalam program tapi melaksanakan	50	1,50	Cukup baik
8. Sarana Kantor dan Usaha Koperasi	Milik sendiri	100	3,00	Sangat baik
JUMLAH			17,25	
Rata-rata bobot kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Tatalaksana dan Manajemen			71,86	Baik

4.5.3 Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Produktivitas

Dari data pengukuran kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Produktivitas yang disajikan pada Tabel 17, dapat dilihat bahwa Rentabilitas Modal Sendiri (ROE) berada pada kriteria kurang baik karena ROE nya adalah 3,24%, artinya setiap Rp 1 modal sendiri akan menghasilkan laba (Sisa Hasil Usaha) Rp 0,0324. Ini menunjukkan rendahnya kemampuan KUD Setia memperoleh sisa hasil usaha atas modal yang ditanamkan. Menurut Munawir (2002), rasio ROE yang rendah disebabkan adanya *over investment* pada aktiva, rendahnya volume penjualan, dan juga karena adanya kegiatan ekonomi yang menurun. Pada tahun 2010 KUD Setia memperoleh laba (Sisa Hasil Usaha) Rp 8.309.105 dan jumlah modal sendiri Rp 256.086.505. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 c.

Return On Asset (ROA) berada pada kriteria kurang baik karena ROA nya adalah 1,91%, artinya setiap Rp 1 aktiva (harta) akan menghasilkan laba (Sisa Hasil Usaha) Rp.0,0191. Ini menunjukkan rendahnya kemampuan KUD Setia memperoleh laba atas aktiva yang diinvestasikan. Menurut Weston (1999), semakin rendah laba maka akan semakin rendah pula ROA yang dihasilkan. Pada tahun 2010 KUD Setia memperoleh laba (Sisa Hasil Usaha) Rp 8.309.105 dan jumlah aktiva Rp 435.085.562. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 c.

Asset Turn Over (ATO) berada pada kriteria tidak baik karena ATO nya adalah 0,26 kali yang berarti tidak efisiennya penggunaan aktiva yang diinvestasikan dimana KUD Setia hanya mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,26 kali dari total aktiva yang dimilikinya. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat penjualan yang bisa dilakukan oleh KUD dibandingkan dengan aktiva yang dimilikinya. Pada tahun 2010 KUD Setia menghasilkan penjualan Rp 112.930.740 dan jumlah aktiva Rp 435.085.562. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 c.

Net Profit Margin (kemampuan menghasilkan laba) berada pada kriteria cukup baik karena NPM nya adalah 7,35%, ini menunjukkan KUD Setia cukup efisien dalam menjalankan usahanya karena setiap Rp 1 penjualan, mampu menghasilkan laba bersih (Sisa Hasil Usaha) Rp 0,0735. Weston (1999), mengungkapkan bahwa rasio NPM tergantung pada jumlah penjualan yang dicapai perusahaan yang menunjukkan apakah perusahaan telah menghasilkan banyak penjualan untuk menutupi biaya perusahaan tapi masih bisa menghasilkan

laba yang banyak. Pada tahun 2010 KUD Setia menghasilkan penjualan Rp 112.930.740 dan Sisa Hasil Usaha Rp 8.309.105. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 c.

Current Ratio berada pada kriteria sangat baik karena rasionya adalah 212,60%, artinya setiap Rp 1 hutang lancarnya mampu dijamin dengan Rp 2,126 aktiva lancarnya. Tahun 2010 KUD Setia mempunyai aktiva lancar Rp 236.862.966 dan hutang lancar Rp 111.411.296. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 c.

Rasio Hutang terhadap Total Aktiva (RHTA) berada pada kriteria sangat baik karena rasionya adalah 39,23%, ini berarti KUD Setia mempunyai kemampuan aktiva yang baik untuk membayar hutangnya, dimana setiap Rp 0,3923 aktiva mampu membayar Rp 1 hutang. Pada tahun 2010 KUD Setia mempunyai total hutang sebesar Rp 170.689.952 dan total aktiva sebesar Rp 435.085.562. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 c.

Rasio Hutang terhadap Modal Sendiri (RHMS) berada pada kriteria sangat baik karena rasionya adalah 66,65%, ini berarti KUD Setia mempunyai kemampuan modal sendiri yang baik untuk membayar hutangnya, dimana setiap Rp 0,6665 hutang mampu dijamin oleh Rp 1 modal sendiri. Pada tahun 2010 KUD Setia mempunyai total hutang sebesar Rp 170.689.952 dan modal sendiri sebesar Rp 256.086.505. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 c.

Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota berada pada kriteria baik karena transaksinya adalah 88,58% yang menunjukkan bahwa unit usaha yang dijalankan KUD Setia memang dibutuhkan oleh anggota. Hal ini terlihat dari banyaknya partisipasi anggota terhadap koperasi dibandingkan non anggota. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 c.

Perputaran piutang berada pada kriteria baik karena perputaran piutangnya adalah 81,43%. Hal ini terjadi karena saldo piutang lebih besar dari jumlah penjualan. Saldo piutang KUD Setia adalah Rp 277.378.496 dan penjualannya Rp 112.930.740. Perhitungannya disajikan pada Lampiran 10 c. Hasil pengukuran kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Produktivitas pada tahun 2010 disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Pengukuran Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Produktivitas Tahun 2010

ASPEK PRODUKTIVITAS	HASIL	SKOR	BOBOT	KRITERIA
1. Rentabilitas Modal Sendiri (Return On Equity /ROE)	3,24%	25	0,75	Kurang baik
2. Return On Asset (ROA)	1,91%	25	0,75	Kurang baik
3. Asset Turn Over (ATO)	0,26 kali	0	0,00	Tidak baik
4. Kemampuan Menghasilkan Laba (Net Profit Margin)	7,36%	50	1,50	Cukup baik
5. Current Ratio (Rasio Lancar)	212,60%	100	3,00	Sangat baik
6. Rasio Hutang terhadap Total Aktiva (RHTA)	39,23%	100	3,00	Sangat baik
7. Rasio Hutang terhadap Modal Sendiri (RHMS)	66,65%	100	3,00	Sangat baik
8. Transaksi Usaha Koperasi dengan Usaha Anggota	88,58%	75	2,25	Baik
9. Perputaran Piutang	81,43%	75	2,25	Baik
JUMLAH			16,50	
Rata-rata Bobot Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Produktivitas			61,11	Cukup Baik

4.5.4 Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Manfaat dan Dampak

Dari data pengukuran kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Manfaat dan Dampak yang disajikan pada Tabel 18, dapat dilihat bahwa kerjasama secara vertikal berada pada kriteria kurang baik karena hanya ada dua jenis kerjasama. Kerjasama dilakukan antara koperasi primer dengan koperasi sekunder, dimana KUD Setia merupakan koperasi primer dan koperasinya adalah Puskud (Pusat Koperasi Unit Desa) Sumatera Barat dan Inkud (Induk Koperasi Unit Desa). Kerjasama dilakukan dengan melakukan penyimpanan sejumlah uang pada Puskud dan Inkud. Kerjasama secara Horizontal berada pada kriteria tidak baik karena tidak ada melakukan kerjasama apapun dengan koperasi primer lainnya.

Kerjasama dengan Badan Usaha Lainnya berada pada kriteria sangat baik karena melakukan lebih dari 5 kerjasama yaitu dengan PLN dan PDAM, dimana

pihak PLN dan PDAM memberikan kemudahan pembayaran kepada pelanggannya dan pihak KUD memperoleh *fee* atas kerjasama yang dilakukan. Kerjasama juga dilakukan dengan BRI, BPD, Bukopin dan Bulog dengan melakukan penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang sebagai modal kerja. Manfaat kerjasama yang diperoleh adalah dapat meningkatkan efisiensi usaha dan pelayanan koperasi kepada anggota. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa efektifitas kerjasama yang dilakukan oleh koperasi dapat meningkatkan usaha yang dijalankan masing-masing koperasi (Riani, 2007).

Penyerapan Tenaga Kerja berada pada kriteria sangat baik. Tahun 2010, KUD Setia memiliki volume usaha sebesar Rp 112.930.740 dengan 5 orang tenaga kerja (Tabel 7). Pembayaran Pajak, Cukai, Retribusi berada pada kriteria sangat baik karena KUD Setia membayar seluruh kewajiban pajak, cukai/retribusi. Ini menunjukkan bahwa KUD Setia taat pada aturan pemerintah. Dana sosial juga berada pada kriteria sangat baik karena tersedia yaitu 2,5% dari SHU dan telah diberikan kepada yang berhak, seperti infak ke mesjid dan sumbangan ke panti asuhan. Ini berarti KUD telah mampu menyediakan hasil usaha untuk membantu pembangunan daerah kerja. Hasil pengukuran kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Manfaat dan Dampak tahun 2010 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Pengukuran Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Manfaat dan Dampak Tahun 2010

ASPEK MANFAAT DAN DAMPAK	HASIL	SKOR	BOBOT	KRITERIA
1. Kerjasama Usaha secara Vertikal	2 jenis koperasi atau kerjasama	25	0,75	Kurang baik
2. Kerjasama Usaha secara Horizontal	Tidak ada melakukan kerjasama	0	0,00	Tidak baik
3. Kerjasama Usaha dengan BU Lain	≥ 5 badan usaha atau jenis kerjasama	100	2,00	Sangat baik
4. Manfaat Kerjasama	Meningkatkan Efisiensi Usaha dan Pelayanan Koperasi pada anggota	100	3,00	Sangat baik
5. Penyerapan Tenaga Kerja	Volume usaha koperasi Rp 112.930.740, dan menyerap 5 orang tenaga kerja	100	2,00	Sangat baik
6. Pembayaran Pajak, Cukai, Retribusi	Membayar seluruh kewajiban pajak, cukai atau retribusi	100	2,00	Sangat baik
7. Dana Sosial	Tersedia dan telah diberikan kepada yang berhak	100	3,00	Sangat baik
JUMLAH			12,75	
Rata-rata Bobot Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Manfaat dan Dampak			70,83	Baik

Berdasarkan pengukuran kinerja koperasi sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Per.Men.No.06/M.KUKM/V/2006) dapat diketahui rata-rata nilai kinerja KUD Setia berdasarkan aspek organisasi, aspek tatalaksana dan manajemen, aspek produktivitas dan aspek manfaat dan dampak yaitu sebesar 67,08 dengan kriteria cukup baik. Hasil penilaiannya disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Rata-Rata Penilaian Kinerja KUD Setia Tahun 2010

No.	Aspek Penilaian Kinerja	Rata-rata Bobot	Kriteria
1.	Organisasi	64,52	Cukup Baik
2.	Tatalaksana dan Manajemen	71,86	Baik
3.	Produktivitas	61,11	Cukup Baik
4.	Manfaat dan Dampak	70,83	Baik
Nilai kinerja		67,08	Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 19, dapat dilihat bahwa rata-rata bobot kinerja tertinggi berada pada aspek tatalaksana dan manajemen, yaitu sebesar 71,86 dengan kriteria baik. Ini menunjukkan bahwa proses atau kegiatan yang dilakukan KUD Setia telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya realisasi anggaran pendapatan dan SHU dibandingkan dengan rencana anggarannya, selain itu juga ditunjang dengan adanya pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota, adanya keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha anggota dan sarana usaha yang merupakan milik sendiri.

Aspek manfaat dan dampak memiliki rata-rata bobot kinerja sebesar 70,83 dengan kriteria baik. Ini menunjukkan bahwa KUD Setia memperoleh manfaat dari usaha dan kerjasama yang mereka lakukan, yang terwujud dari jumlah penyerapan tenaga kerja dan adanya penyediaan hasil usaha untuk membantu pembangunan daerah kerja. Dengan adanya kerjasama dengan koperasi dan badan usaha lainnya, KUD Setia dapat meningkatkan efisiensi usaha dan pelayanan terhadap anggotanya.

Aspek Organisasi memiliki rata-rata bobot kinerja sebesar 64,52 dengan kriteria cukup baik. Aspek organisasi menunjukkan hubungan kerjasama koperasi dengan anggotanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini menunjukkan bahwa hubungan kerjasama koperasi dengan anggotanya belum sepenuhnya terwujud, yang dapat dilihat dari tidak adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan

yang dilakukan KUD terhadap pengelola (pengurus, pengawas dan karyawan) dan anggotanya.

Aspek Produktivitas memiliki rata-rata bobot kinerja terendah, yaitu sebesar 61,11 dengan kriteria cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa KUD belum sepenuhnya mampu memperoleh output yang maksimal dalam menjalankan usahanya yang terlihat dari masih rendahnya kemampuan KUD Setia dalam memperoleh keuntungan atas modal yang ditanamkan, rendahnya kemampuan memperoleh keuntungan atas aktiva yang diinvestasikan dan rendahnya tingkat penjualan yang bisa dihasilkan dari aktiva yang dimilikinya.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, pada tahun 2011 telah dilakukan penilaian Kinerja terhadap KUD yang ada di Kabupaten Solok berdasarkan tahun buku 2011/0, yang dilakukan untuk memeringkatkan prestasi KUD. Penilaian dilakukan terhadap enam aspek, yaitu Aspek Keaktifan Badan Usaha, Aspek Kinerja Usaha, Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota, Aspek Orentasi Pelayanan Anggota, Aspek Pelayanan Masyarakat dan Aspek Kontribusi terhadap Pembangunan. Hasil pengukurannya menunjukkan bahwa KUD Setia termasuk kedalam koperasi podusen berprestasi peringkat ke III di Kabupaten Solok (Lampiran 11 dan 12) dengan nilai kinerja sebesar 397 dan digolongkan kepada kriteria "Koperasi Berkualitas". Koperasi Berkualitas adalah koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip koperasi dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Menurut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, hasil pengukuran yang diperoleh dibagi dalam 5 klasifikasi kualitas koperasi yaitu, yaitu : koperasi sangat berkualitas dengan jumlah penilaian diatas 419, koperasi berkualitas dengan jumlah penilaian 340 sampai dengan 419, koperasi cukup berkualitas dengan jumlah penilaian 260 sampai dengan 339, koperasi kurang berkualitas dengan jumlah penilaian 180 sampai dengan 259, dan koperasi tidak berkualitas dengan jumlah penilaian kurang dari 180.

4.6 Kepuasan Anggota KUD Setia

Penelitian tentang kepuasan anggota KUD Setia dilakukan terhadap 34 orang anggota KUD Setia yang menjadi responden penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden menurut umur dengan persentase tertinggi adalah umur 31– 40 tahun yaitu sebesar 41,17 persen. Responden sebahagian besar adalah perempuan yaitu sebanyak 61,76 persen. Tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 35,29 persen dan kebanyakan responden mempunyai pekerjaan sebagai petani yaitu sebesar 38,23 persen. Karakteristik responden penelitian yang dilakukan di KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Karakteristik Responden di KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

No.	Karakteristik Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	Umur		
	a. 31 — 40 tahun	14	41,17
	b. 41 — 50 tahun	13	38,24
	c. > 50 tahun	7	20,59
	Jumlah	34	100
2.	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	13	38,24
	b. Perempuan	21	61,76
	Jumlah	34	100
3.	Pendidikan terakhir		
	a. SD	12	35,29
	b. SMP	7	20,59
	c. SMA	10	29,41
	d. Diploma	1	2,94
	e. Sarjana	4	11,77
	Jumlah	34	100
4.	Pekerjaan		
	a. Petani	13	38,23
	b. Ibu Rumah Tangga	6	17,65
	c. Wiraswasta	10	29,41
	d. Pegawai Negeri Sipil	5	14,71
	Jumlah	34	100

Deskripsi hasil kepuasan anggota KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dimana masing - masing responden memberikan penilaian sesuai interpretasinya. Berikut adalah penilaian responden terhadap 16 butir indikator yang dinilai.

4.6.1Kepuasan Anggota berdasarkan Administrasi Koperasi

Variabel administrasi koperasi terdiri dari indikator proses menjadi anggota, pencatatan data anggota oleh koperasi dan pelaksanaan rapat anggota. Deskripsi masing-masing atribut tersebut disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Administrasi Koperasi

Indikator	Bobot 5		Bobot 4		Bobot 3		Bobot 2		Bobot 1		Rata skor	TKR (%)	Kriteria
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
Proses Menjadi Anggota	12	35,3	18	52,9	4	11,8	-	-	-	-	4,2	84,0	Baik
Pencatatan Data Anggota oleh Koperasi	5	14,7	22	64,7	7	20,6	-	-	-	-	3,9	78,0	Baik
Pelaksanaan Rapat Anggota	7	20,6	6	17,6	21	61,7	-	-	-	-	3,6	72,0	Cukup baik
Jumlah											11,7	234,0	
Rata-Rata Tingkat Kepuasan Anggota berdasarkan Administrasi Koperasi											3,9	78,0	Baik

Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwa penilaian kepuasan anggota berdasarkan indikator proses menjadi anggota memiliki rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 4,2 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) sebesar 84 persen dan berada pada kriteria baik. Setiap orang yang ingin menjadi anggota koperasi, harus dapat memenuhi beberapa persyaratan seperti harus mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto dan foto kopi ktp dan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Saat ini proses untuk menjadi anggota dianggap mudah oleh responden, dapat diikuti dan bisa diselesaikan dalam waktu satu hari kerja saja, sehingga mereka menganggap kinerja berdasarkan indikator ini sudah baik. Kemudahan proses menjadi anggota ini tentunya akan mempercepat anggota untuk segera dapat menerima pelayanan dari KUD dan dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

Indikator pencatatan anggota oleh koperasi yang dilaksanakan oleh KUD Setia memiliki rata-rata skor sebesar 3,9 dengan Tingkat Kepuasan Responden

(TKR) sebesar 78 persen dan berada pada kriteria baik. Hal ini terjadi karena sebahagian besar responden menilai bahwa KUD Setia ada melakukan pencatatan data anggota seperti data jumlah simpanan anggota, hutang hutang dan piutang koperasi, yang dapat diketahui pada waktu diselenggarakannya RAT. Hal ini bersesuaian dengan pengukuran kinerja berdasarkan Permen yang berada pada kriteria sangat baik, dimana seluruh anggota yang ada di KUD dicatat dalam buku daftar anggota. Pencatatan yang baik tentunya akan memudahkan untuk mengetahui bagaimana perkembangan KUD Setia selama ini. Data yang dicatat dapat dimanfaatkan untuk mengetahui perkembangan terkini dari koperasi dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi koperasi secara transparan sekaligus melakukan pengawasan kinerja koperasi oleh anggota.

Indikator pelaksanaan rapat anggota yang dilaksanakan oleh KUD Setia memiliki rata-rata skor terendah yaitu sebesar 3,6 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) sebesar 72 persen dan berada pada kriteria cukup baik. Hal ini terjadi karena sebahagian besar responden menyatakan bahwa KUD Setia menyelenggarakan rapat anggota satu kali dalam setahun. Berdasarkan wawancara dengan anggota, sebahagian besar dari mereka ikut menghadiri rapat anggota untuk mengetahui kondisi terkini dari KUD dan agar quorum rapat terpenuhi sehingga hasil rapat dapat disahkan, sedangkan dalam penyusunan rencana kerja dan RAPB Koperasi anggota tidak pernah dilibatkan. Hal ini terjadi karena anggota belum paham dengan fungsi rapat anggota koperasi padahal rapat anggota merupakan wadah bagi anggota untuk memberikan usul dan kritikan kepada koperasi dan pada rapat anggota juga terdapat kekuasaan tertinggi dari koperasi.

4.6.2 Kepuasan Anggota berdasarkan Etos Kerja (Budaya Kerja) Pengurus

Variabel etos kerja (budaya kerja) pengurus terdiri dari indikator keramahan pengurus, kecepatan saat menanggapi keluhan, ketepatan menanggapi keluhan dan penampilan atau kerapian pengurus. Deskripsi masing-masing atribut tersebut dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Etos Kerja (Budaya Kerja) Pengurus

Indikator	Bobot 5		Bobot 4		Bobot 3		Bobot 2		Bobot 1		Rata skor	TKR (%)	Kriteria
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
Keramahan Pengurus	14	41,2	10	29,4	8	23,5	1	2,9	1	2,9	4,1	82,0	Baik
Kecepatan Saat Menanggapi Keluhan	9	26,5	5	14,7	20	58,8	-	-	-	-	3,7	74,0	Cukup baik
Ketepatan Menanggapi Keluhan	-	-	16	47,1	18	52,9	-	-	-	-	3,5	70,0	Cukup baik
Penampilan (Kerapian) Pengurus	4	11,8	6	17,6	7	20,6	13	38,2	4	11,8	2,8	56,0	Cukup baik
Jumlah											14,1	282,0	Cukup baik
Rata-Rata Tingkat Kepuasan Anggota berdasarkan Budaya Kerja Pengurus											3,5	70,5	

Berdasarkan Tabel 22, dapat dilihat bahwa penilaian kepuasan anggota berdasarkan indikator keramahan pengurus, memiliki rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 4,1 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) sebesar 82 persen dan berada pada kriteria baik. Menurut Abdilla (2009), Keramahan merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap pelanggan dan perhatian kepada konsumen. Oleh karena itu, orientasi pelayanan yang baik akan memperhatikan dan memberikan keramahan dalam pelayanan. Keramahan merupakan bagian dari nilai dasar di dalam berinteraksi. Setiap orang pada hakikatnya ingin dilayani dengan ramah, begitu juga dengan anggota koperasi, mereka ingin mendapatkan sambutan yang baik saat berhubungan dengan koperasi. Kinerja berdasarkan indikator ini dianggap sudah baik yang ditandai dengan antusias pengurus melayani dengan mengucapkan salam dan senyum kepada anggota sehingga anggota merasa nyaman dan betah melakukan transaksi dengan KUD.

Indikator kecepatan saat menanggapi keluhan anggota memiliki rata-rata skor sebesar 3,7 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) sebesar 74 persen dan berada pada kriteria cukup baik. Hal ini terjadi karena sebahagian besar responden merasa pengurus masih menanggapi keluhan mereka dalam hari yang sama walaupun menunggu sesaat. Menurut Abdilla (2009), keluhan biasanya timbul akibat ada ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan yang terjadi. Oleh karena itu pelayanan yang baik akan menanggapi keluhan yang muncul di dalam waktu yang singkat. Kecepatan menanggapi keluhan yang

dimaksud merupakan lamanya waktu yang dialami oleh anggota sampai keluhannya ditanggapi. Waktu yang menjadi ukuran di dalam atribut ini dimulai sejak anggota memberikan keluhan hingga mendapatkan tanggapan yang sesuai dengan keluhan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat skema kerja yang jelas dalam menerima keluhan. Setiap keluhan dicatat, kemudian setiap perkembangan dari keluhan terus dipantau. Setiap jenis keluhan dapat juga ditanggapi oleh orang yang ditunjuk khusus, yang bertanggung jawab menyelesaikan keluhan tersebut.

Indikator ketepatan menanggapi keluhan anggota memiliki rata-rata skor sebesar 3,5 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) sebesar 70 persen dan berada pada kriteria cukup baik. Hal ini terjadi karena sebahagian besar responden merasa tanggapan yang diberikan sesuai dengan keluhan yang mereka laporkan, sehingga anggota merasa dapat mempercayakan masalah yang dialaminya kepada KUD. Menurut Abdilla (2009), ketepatan dalam menanggapi keluhan dapat dilihat dari seberapa baik keluhan pelanggan di atasi oleh penyedia jasa.

Indikator penampilan (kerapian) pengurus memiliki rata-rata skor terendah yaitu sebesar 2,8 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) sebesar 56 persen dan berada pada kriteria cukup baik. Hal ini terjadi karena pengurus sudah menggunakan pakaian yang rapi dan bersepatu walaupun belum berpakaian seragam. Berdasarkan wawancara, sebahagian besar responden menganggap tidak terlalu mempermasalahkan indikator ini, karena bagi mereka yang penting adalah kualitas pelayanan pengurus kepada mereka. Jadi kondisi penampilan pengurus saat ini sudah cukup baik dimata responden, sehingga pengurus dapat lebih berkonsentrasi kepada peningkatan kinerja indikator yang lainnnya.

4.6.3 Kepuasan Anggota berdasarkan Keuangan Koperasi

Variabel keuangan koperasi terdiri dari indikator pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Deskripsi atribut tersebut disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Keuangan Koperasi

Indikator	Bobot 5		Bobot 4		Bobot 3		Bobot 2		Bobot 1		Rata skor	TKR (%)	Kriteria
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
Pembagian SHU	13	38,2	9	26,5	12	35,3	-	-	-	-	4,1	82,0	Baik
Jumlah											4,1	82,0	Baik
Rata-Rata Tingkat Kepuasan Anggota berdasarkan Keuangan Koperasi											4,1	82,0	

Berdasarkan Tabel 23, dapat dilihat bahwa penilaian kepuasan anggota berdasarkan indikator pembagian SHU memiliki rata-rata skor sebesar 4,1 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) sebesar 82 persen dan berada pada kriteria baik. Hal ini terjadi karena sebahagian besar responden menyatakan bahwa pembagian SHU diberikan tiap tahun dan sudah tepat waktu. Berdasarkan wawancara dengan pengurus, pemberian SHU biasanya diberikan menjelang hari raya Idul Fitri. Pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi. Semakin besar andil anggota, akan semakin besar pula SHU yang diterima anggota.

4.6.4 Kepuasan Anggota berdasarkan Usaha Simpan Pinjam

Variabel usaha simpan pinjam terdiri dari indikator proses memperoleh kredit, waktu memperoleh kredit, jumlah kredit yang diterima dan tingkat suku bunga yang ditetapkan. Deskripsi masing-masing atribut disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Usaha Simpan Pinjam

Indikator	Bobot 5		Bobot 4		Bobot 3		Bobot 2		Bobot 1		Rata skor	TKR (%)	Kriteria
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
Prosedur memperoleh kredit	11	32,4	15	44,1	8	23,5	-	-	-	-	4,1	82,0	Baik
Waktu memperoleh kredit	5	14,7	3	8,8	9	26,5	11	32,4	6	17,6	2,7	54,0	Kurang baik
Jumlah kredit yang diterima	3	8,8	6	17,6	20	58,8	5	14,7	-	-	3,2	64,0	Cukup baik
Tingkat suku bunga pinjaman yang ditetapkan	8	23,5	15	44,1	11	32,4	-	-	-	-	3,9	78,0	Baik
Jumlah											13,9	278,0	Cukup baik
Rata-Rata Tingkat Kepuasan Anggota berdasarkan Usaha Simpan Pinjam											3,5	69,5	

Berdasarkan Tabel 24, dapat dilihat bahwa penilaian kepuasan anggota berdasarkan indikator prosedur memperoleh kredit memiliki rata-rata skor sebesar 4,1 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) sebesar 82 persen dan berada pada kriteria baik. Hal ini terjadi karena sebahagian besar responden merasa prosedur memperoleh kredit mudah diikuti dan dapat selesai dalam waktu satu sampai tiga hari. Saat ini prosedur untuk memperoleh kredit dianggap mudah oleh responden, sehingga mereka menganggap kinerja indikator ini sudah baik.

Kemudahan prosedur untuk memperoleh kredit ini tentunya akan mempercepat dan memudahkan anggota mendapatkan pelayanan jasa usaha simpan.

Pada indikator waktu memperoleh kredit, diperoleh rata-rata skor sebesar 2,7 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) 54 persen dan berada pada kriteria kurang baik. Hal ini terjadi karena sebahagian besar responden menyatakan bahwa kredit diperoleh dengan menunggu tiga hari sampai satu minggu. Pada indikator jumlah kredit yang diterima, diperoleh rata-rata skor sebesar 3,2 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) 64 persen dan berada pada kriteria cukup baik. Hal ini terjadi karena sebahagian besar responden menyatakan bahwa jumlah kredit yang diinginkan tersedia dengan batas maksimal peminjaman sebesar Rp 5.000.000 dan dapat memenuhi kebutuhan.

Indikator tingkat suku bunga yang ditetapkan, diperoleh rata-rata skor sebesar 3,9 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) 78 persen dan berada pada kriteria baik. Hal ini terjadi karena sebahagian besar responden menyatakan bahwa tingkat suku bunga di KUD Setia sedikit lebih rendah yaitu 1,5% per bulan dibandingkan jika meminjam pada rentenir yang menetapkan suku bunga pinjaman besar dari 18% - 20% per tahunnya.

4.6.5 Kepuasan Anggota berdasarkan Usaha RMU (*Rice Milling Unit*)

Variabel usaha RMU terdiri dari indikator biaya yang dikeluarkan jika menggunakan RMU di KUD, mutu beras yang dihasilkan dan jam operasional RMU. Deskripsi masing-masing atribut tersebut disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Usaha RMU

Indikator	Bobot 5		Bobot 4		Bobot 3		Bobot 2		Bobot 1		Rata skor	TKR (%)	Kriteria
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
Biaya yang dikeluarkan jika menggunakan RMU di KUD	10	29,4	15	44,1	9	26,5	-	-	-	-	4,1	82,0	Baik
Mutu beras yang dihasilkan	11	32,4	14	41,2	9	26,5	-	-	-	-	4,0	80,0	Baik
Jam operasional usaha RMU	-	-	8	23,5	26	76,5	-	-	-	-	3,2	64,0	Cukup baik
Jumlah											11,3	226,0	Cukup baik
Rata-Rata Tingkat Kepuasan Anggota berdasarkan Usaha RMU											3,8	75,3	

Berdasarkan Tabel 25, dapat dilihat bahwa penilaian kepuasan anggota berdasarkan indikator biaya yang dikeluarkan jika menggunakan RMU di KUD memiliki rata-rata skor sebesar 4,1 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) sebesar 82 persen dan berada pada kriteria baik. Hal ini terjadi karena sebahagian besar responden menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan sedikit lebih murah jika menggunakan RMU di KUD yaitu mereka hanya mengeluarkan biaya transportasi untuk mengangkut padi mereka ketempat penggilingan di KUD Setia dan dengan memberikan 4,5 kg beras setiap penggilingan 70 kg padi.

Indikator mutu beras yang dihasilkan memiliki rata-rata skor sebesar 4,0 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) sebesar 80 persen dan berada pada kriteria baik. Hal ini terjadi karena sebahagian besar responden menyatakan bahwa beras yang dihasilkan dari RMU KUD tidak berhama dan tidak berpasir.

Indikator jam kerja unit usaha RMU memiliki rata-rata skor sebesar 3,2 dengan Tingkat Kepuasan Responden (TKR) sebesar 64 persen dan berada pada kriteria cukup baik. Hal ini terjadi karena unit RMU yang ada di KUD Setia buka pada hari kerja KUD yaitu Senin sampai Sabtu mulai pukul 10.00 - 17.00 WIB.

4.6.6 Kepuasan Anggota berdasarkan Usaha Penagihan Rekening Listrik dan PDAM

Deskripsi tentang indikator usaha penagihan rekening listrik dan PDAM disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Usaha Penagihan Rekening Listrik dan PDAM

Indikator	Bobot 5		Bobot 4		Bobot 3		Bobot 2		Bobot 1		Rata skor	TKR (%)	Kriteria
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
Manfaat adanya unit penagihan rekening listrik dan PDAM	15	44,1	13	38,2	6	17,6	-	-	-	-	4,2	84,0	Baik
Jumlah											4,2	84,0	Baik
Tingkat Kepuasan Anggota berdasarkan Usaha Penagihan Rekening Listrik dan PDAM											4,2	84,0	

Berdasarkan Tabel 26, dapat dilihat bahwa penilaian kepuasan anggota berdasarkan indikator manfaat adanya unit penagihan rekening listrik dan PDAM pada KUD memiliki rata-rata skor sebesar 4,2 dengan Tingkat Kepuasan

Responden (TKR) sebesar 84 persen dan berada pada kriteria baik. Ini terjadi karena sebahagian besar responden merasakan manfaat dengan adanya usaha ini yaitu proses pembayaran lancar dan lokasinya dekat sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Berdasarkan data kepuasan anggota dapat diketahui hasil penilaian tingkat kepuasan anggota KUD Setia. Hasil penilaiannya disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27. Penilaian Tingkat Kepuasan Anggota KUD Setia

No.	Variabel Kepuasan Anggota	TKR (%)	Kriteria
1.	Administrasi koperasi	78,00	Baik
2.	Etos kerja (budaya kerja) pengurus	70,50	Cukup Baik
3.	Keuangan koperasi	82,00	Baik
4.	Usaha simpan pinjam	69,50	Cukup Baik
5.	Usaha RMU	75,30	Cukup Baik
6.	Usaha penagihan rekening listrik dan PDAM	84,00	Baik
Nilai Kepuasan Anggota		76,55	Baik

Berdasarkan Tabel 27, dapat dilihat bahwa Variabel Usaha Penagihan Rekening Listrik dan PDAM memperoleh tingkat kepuasan anggota paling tinggi, yaitu sebesar 84 persen dengan kriteria baik. Ini menunjukkan bahwa anggota KUD Setia merasa unit usaha ini memberikan manfaat kepadanya. Hal ini juga akan meningkatkan kinerja KUD yang terwujud dari besarnya keuntungan (Laba bersih) yang diperoleh KUD Setia pada usaha ini dibandingkan usaha lainnya.

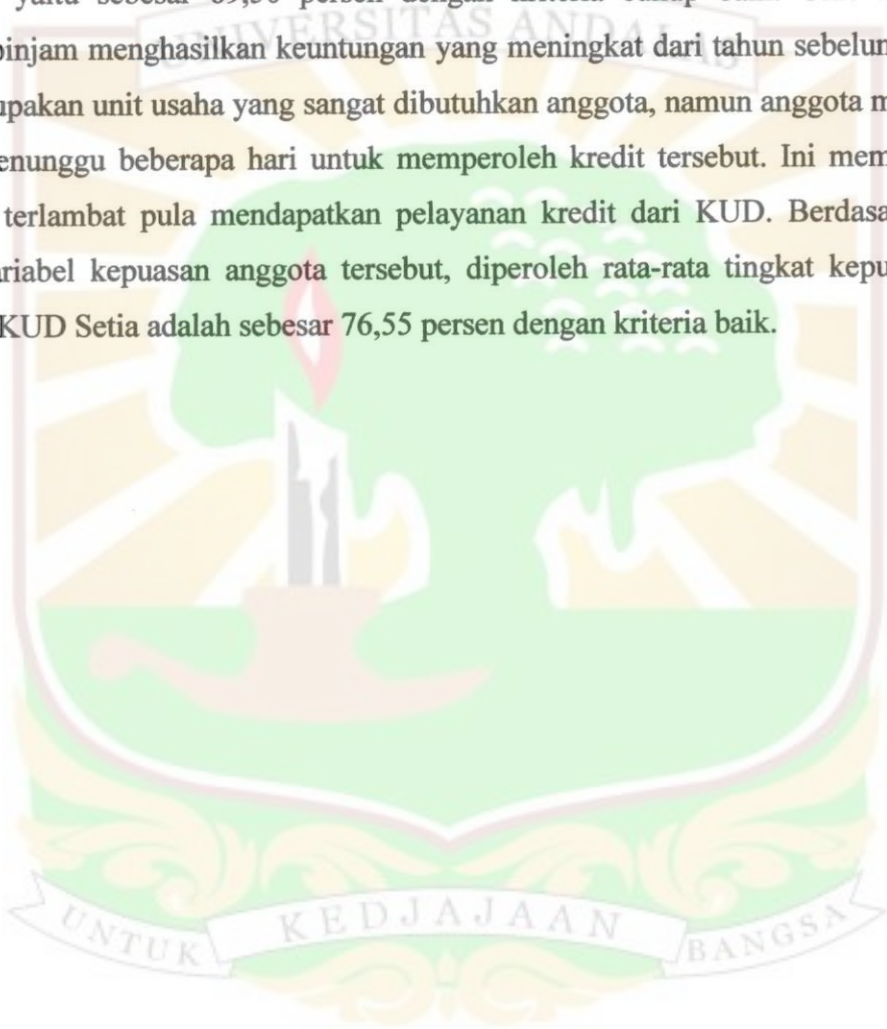
Berdasarkan variabel keuangan koperasi, diperoleh tingkat kepuasan responden sebesar 82 persen dengan kriteria baik. Ini menunjukkan bahwa anggota KUD Setia merasa pembagian SHU sudah sesuai dengan keinginannya. Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa usaha anggota terhadap koperasi merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah koperasi.

Berdasarkan variabel administrasi koperasi, diperoleh tingkat kepuasan responden sebesar 78 persen dengan kriteria baik. Hal ini terjadi karena adanya kemudahan proses menjadi anggota dan pencatatan yang baik terhadap data anggota. Administrasi koperasi yang baik dapat menarik minat seseorang untuk menjadi anggota koperasi.

Berdasarkan variabel usaha RMU, diperoleh tingkat kepuasan responden sebesar 75,30 persen dengan kriteria cukup baik. Meskipun sudah berada pada kriteria cukup baik, namun keuntungan yang diterima KUD dari unit usaha ini

menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena RMU di KUD hanya beroperasi pada hari kerja saja dan persaingan dengan RMU lain yang memiliki kelebihan pelayanan membuat pelanggan beralih ke RMU lain. Pada variabel budaya kerja koperasi, diperoleh tingkat kepuasan responden sebesar 70,50 persen dengan kriteria cukup baik. Ini terjadi karena anggota merasa pengurus sudah cukup baik dalam menanggapi keluhan mereka.

Pada variabel usaha simpan pinjam diperoleh tingkat kepuasan anggota terendah yaitu sebesar 69,50 persen dengan kriteria cukup baik. Unit usaha simpan pinjam menghasilkan keuntungan yang meningkat dari tahun sebelumnya dan merupakan unit usaha yang sangat dibutuhkan anggota, namun anggota masih harus menunggu beberapa hari untuk memperoleh kredit tersebut. Ini membuat anggota terlambat pula mendapatkan pelayanan kredit dari KUD. Berdasarkan enam variabel kepuasan anggota tersebut, diperoleh rata-rata tingkat kepuasan anggota KUD Setia adalah sebesar 76,55 persen dengan kriteria baik.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tentang Analisis Kinerja pada KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja KUD Setia memperlihatkan hasil bahwa bobot kinerja berdasarkan Aspek Tatalaksana dan Manajemen adalah sebesar 71.86, Aspek Manfaat dan Dampak sebesar 70.83, Aspek Organisasi sebesar 64.52 dan Aspek Produktivitas sebesar 61.11. Total bobot kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 67,08. Meskipun kinerja secara keseluruhan dinilai cukup baik, namun adanya ketidakoptimalan dan ketidakberhasilan pencapaian target suatu ukuran kinerja secara jangka panjang akan membawa akumulasi resiko penurunan kinerja koperasi yang semakin besar jika tidak diantisipasi dengan tindakan yang tepat. Berikut beberapa indikator yang memerlukan perbaikan dalam penilaiannya, yaitu : Pendidikan dan Pelatihan bagi Anggota dan Pengelola Koperasi, Penerangan dan Penyuluhan, Rentabilitas Modal Sendiri, *Return On Asset (ROA)*, *Asset Turn Over (ATO)*, Kerjasama secara Vertikal dan Horizontal.
2. Pengukuran Tingkat Kepuasan Anggota KUD Setia memperlihatkan hasil sebesar 76,55 persen dengan kriteria baik, dimana pada variabel usaha penagihan rekening listrik dan PDAM diperoleh tingkat kepuasan sebesar 84 persen, keuangan koperasi sebesar 82 persen, administrasi koperasi sebesar 78 persen, usaha RMU sebesar 75,30 persen, budaya kerja pengurus sebesar 70,50 dan usaha simpan pinjam sebesar 69,50 persen.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait hasil yang diperoleh pada penelitian tentang Analisis Kinerja pada KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. KUD Setia diharapkan melakukan kegiatan pendidikan perkoperasian pada pengelola dan anggota koperasi untuk meningkatkan kemampuan pengurus

dan karyawan, serta anggota dapat menyadari pentingnya peran sertanya dalam koperasi. Selain itu dengan adanya pendidikan berarti KUD sudah melaksanakan prinsip koperasi yang keenam yaitu pendidikan perkoperasian. Pendidikan dapat dilakukan dengan latihan kewirausahaan atau melakukan pembinaan terhadap usaha anggota.

2. Penurunan pendapatan unit usaha RMU dapat ditanggulangi dengan cara menambah pelayanan pada pelanggan melalui penambahan jam operasional RMU, menambah karyawan sebagai petugas penjemuran padi dan layanan antar jemput, sehingga dapat bersaing dengan unit RMU lainnya. Ini diharapkan dapat menambah pelanggan dan meningkatkan keuntungan.
3. Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi sebaiknya disusun dengan melibatkan anggota dalam penyusunannya, sehingga RK dan RAPB sesuai dengan kebutuhan anggota demi kemajuan KUD pada masa akan datang.
4. Dalam pelaksanaan RAT, diupayakan anggota turut aktif dalam menyalurkan aspirasinya dengan memberikan pendapat ataupun saran yang akan bermanfaat bagi kemajuan koperasi.
5. KUD Setia perlu menyediakan kotak kritik dan saran serta melakukan diskusi bulanan secara rutin antara pengurus dan anggota untuk mengetahui penilaian anggota terhadap layanan koperasi baik di bidang usaha maupun bidang organisasi sehingga kebutuhan anggota ternilai secara cermat dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilla, Amrul Emil. 2009. *Analisis Persepsi dan Kepuasan Anggota Terhadap Pelayanan KUD Giri Tani Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Bogor. Internet. www.google.com (2 Febuari 2011).
- Anoraga, Pandji. 1997. *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta. Semarang.
- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti. 1995. *Manajemen Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Amzah, Irza Yuliadi. 2001. *Analisis Kinerja Usaha Koperasi Berdasarkan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Padang)*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Atkinson, Antony. A. Et. Al. 1995. *Management Accounting* Prentice Hall, New Jersey.
- Baga, LM. 2003. Foolishisasi Koperasi. <http://www.kompas.com>
- Baswir, R. 2000. *Koperasi Indonesia*, Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Hansen and Mowen. 1995. *Cost Management Accounting and Control*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Hendar dan Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hendrojogi. 2000. *Koperasi dan Azas-Azas, Teori dan Praktek*. Rajawali Press. Jakarta.
- Hertiningsih, Nola. 2006. *Analisis Perkembangan Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Panampung Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Himpuni, Okwan. 2008. *Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Alam Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. [Skripsi]. Program Sarjana Agribisnis Penyelenggaraan Khusus Departemen Agribisnis FEM IPB. Bogor. Internet. www.google.com (21 Mei 2010).

- Ikhsan, Sukardi. 2005. *Pengukuran Kinerja Koperasi*. Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Koperasi GKPRI Jawa Tengah. Semarang.
- Kaplan dan Norton. 1996. *Balanced Score Card Menerapkan Strategi menjadi Aksi*. Erlangga. Jakarta.
- Kartasapoetra, G. 1991. *Koperasi Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Krisnamurthi, B. 1998. *Perkembangan Kelembagaan dan Prilaku Usaha KUD di Jawa Barat*. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mahmud, S. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi dan Koperasi*. PT. Intermasa. Aceh.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Erlangga. 2001. Jakarta.
- Mulyadi dan J. Setiawan. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen Sistem Pelipatgandaan Kinerja*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Munawir. 1989. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- , 2002. *Analisa Laporan Keuangan Edisi keempat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nasution, M. 1990. *Keragaan Koperasi Unit Desa Sebagai Organisasi Ekonomi Pedesaan*. Disertasi. Fakultas Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- , 2002. *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri*. IPB Press. Bogor.
- Nazir, mohd. 2004. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Palapa, MKP. 2006. *Evaluasi Kinerja Koperasi Pada Koperasi Puspa Anggrek di Kabupaten Tangerang* [Skripsi]. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Putra, WMD. 2006. *Analisis Kinerja Keuangan dan Kemampuan Pelayanan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kabupaten Garut*. [Skripsi]. Bogor: Program Studi Manajemen Agribisnis. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rangkuti, F. 2005. *Measuring Costumer Satisfaction*. PT Gramedia. Jakarta.
- Riani, Eli Dewi. 2007. *Kinerja Koperasi berdasarkan Kep,Men.No.129/KEP/M/KUKM/XI/2002, Hambatan, Permasalahan dan Implementasinya (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai RI Se- Kabupaten Pemalang*, [Skripsi]. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang.

- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Unpar Press. Bandung.
- Soeradjiman. 1996. *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*. Dekopin. Jakarta.
- Sudarsono & Edilius. 2002. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sukamdiyo, Ign. 1996. *Manajemen Koperasi*. Erlangga. Jakarta.
- Supriant. 2006. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Suyono. 1996. *Koperasi dalam Sorotan Pers*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Swasembada. 2007. Majalah : Master of CS 2007, No.19/XXIII/3-12 September.2007
- Umar, Husein. 2002. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Gramedia. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: Tanggal 21 Oktober 1992.*
- Weston, J.Fred. 1991. *Manajemen Keuangan*. Erlangga. Jakarta.
- Widiyanti, Ninik, dkk. 2003. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1991. *Manajemen Koperasi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- [www. Wikipedia.org/wiki/Koperasi](http://www.Wikipedia.org/wiki/Koperasi). Kategori: Koperasi (21 Mei 2010)

Lampiran 1. Keadaan KUD menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Kabupaten/ Kota	Jumlah KUD (unit)	Jumlah Anggota (orang)
<u>Kabupaten</u>		
Kepulauan mentawai	18	1.378
Pesisir selatan	45	1.882
Solok	30	26.548
Sijunjung	39	2.480
Tanah datar	26	17.890
Padang pariaman	20	9.069
Agam	46	17.446
50 kota	42	5.849
Pasaman	22	10.236
Solok selatan	13	1.021
Dharmasraya	46	19.383
Pasaman barat	17	13.758
<u>Kota</u>		
Padang	12	5.191
Solok	1	2.248
Sawahlunto	4	460
Padang panjang	2	1.629
Bukittinggi	1	1.422
Payakumbuh	5	2.576
Pariaman	5	773
Jumlah	394	141.239

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar, 2010

Lampiran 2. Keadaan Modal Sendiri Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Solok Tahun Buku 2009

No	Nama KUD	Keadaan	Modal Sendiri (Rp)
1	KUD Surian	aktif	27.535.744
2	KUD Sinar Gumanti	Tidak aktif	43.410.500
3	KUD Air Dingin	Tidak aktif	17.270.965
4	KUD Sungai Nanam	Tidak aktif	20.170.200
5	KUD Koto Anau	Tidak aktif	62.120.126
6	KUD Selayo Tanang	Tidak aktif	19.858.860
7	KUD Supayang	Tidak aktif	2.597.500
8	KUD Sirukam	Tidak aktif	20.507.700
9	KUD Sungai Lasi	aktif	40.702.550
10	KUD Koto Baru	aktif	154.693.136
11	KUD Setia Selayo	aktif	229.862.440
12	KUD Panyakalan	Tidak aktif	35.171.200
13	KUD Gantung Ciri	Tidak aktif	49.611.843
14	KUD Cupak	Tidak aktif	48.882.482
15	KUD Talang	Tidak aktif	9.595.745
16	KUD Guguk	Tidak aktif	69.142.077
17	KUD Jawi-Jawi	Tidak aktif	4.047.375
18	KUD Manunggal	aktif	126.584.207
19	KUD Koto Gaek	Tidak aktif	4.408.240
20	KUD Paninggahan Sirih	aktif	121.970.197
21	KUD Sulit Air	aktif	10.420.000
22	KUD Paninjauan	Tidak aktif	246.955.946
23	KUD Sumani	aktif	160.521.535
24	KUD Koto Sani	aktif	14.406.822
25	KUD Singkarak	aktif	49.648.542
26	KUD Saning Bakar	Tidak aktif	22.566.900
27	KUD Katika	aktif	34.018.106
28	KUD Muara Panas	aktif	180.495.720
29	KUD Bukit Tandang	Tidak aktif	14.441.762
30	KUD Kinari	Tidak aktif	36.357.481

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, 2010



Lampiran 3a. Ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang Penilaian Koperasi Berprestasi
Per.Men.No.06/Per/M.KUKM/V/2006

PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 06/Per/M.KUKM/V/2006
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
KOPERASI BERPRESTASI/KOPERASI AWARD

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan motivasi pada koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat, maka perlu dilakukan penilaian terhadap prestasi yang dicapai Koperasi dalam kurun waktu tertentu
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penilaian terhadap prestasi, maka diperlukan adanya kebijakan Pemerintah yang mengikut sertakan lembaga independent untuk pelaksanaan penilaian
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award.

KETENTUAN UMUM

1. Koperasi Berprestasi adalah Koperasi yang memiliki prestasi dalam pencapaian kinerjanya dilihat dari aspek organisasi, aspek tatalaksana dan manajemen, aspek produktivitas, serta aspek manfaat dan dampak koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Koperasi Award adalah Koperasi Berprestasi yang dinilai dan diverifikasi secara khusus serta ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerima penghargaan/Award

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award adalah :

1. Memberikan motivasi pada koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat;
2. Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu sebagai gambaran keberhasilan upaya pengembangan koperasi;
3. Mengembangkan sinergi pemberdayaan Koperasi dan peningkatan peran serta Instansi terkait serta Gerakan Koperasi dan masyarakat dalam pengembangan koperasi.

Sasaran Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award :

1. Koperasi Kelompok Simpan Pinjam, yang termasuk adalah : Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Koperasi), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR), dan koperasi yang melaksanakan usaha di bidang jasa keuangan dan pembiayaan;
2. Koperasi Kelompok Konsumen, yang termasuk adalah : Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Karyawan (KOPKAR), Koperasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan koperasi fungsional lainnya
3. Koperasi Kelompok Produsen, yang termasuk adalah : Koperasi Pengrajin Tahu Tempe (KOPTI), Koperasi Pertanian (KOPTAN), Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (KOPINKRA) dan jenis koperasi produsen lainnya;
4. Koperasi Kelompok Aneka Usaha, yang termasuk adalah : Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Angkutan, Koperasi Profesi, Koperasi Audit, Koperasi Perumahan dan Koperasi jasa Lainnya,
5. Koperasi Wanita
6. Koperasi Pondok Pesantren
7. Koperasi Pedagang Pasir

Lampiran 3b. Penilaian Kinerja berdasarkan Per.Men.No.06/Per/M.KUKM/V/2006

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06/Per/M.KUKM/V/2006

KERTAS KERJA PENILAIAN

No.	Aspek Penilaian	Komponen Penilaian	Bobot
1.	Organisasi	1. Pelunasan Simpanan Pokok (SP) Anggota 2. Pelunasan Simpanan Wajib (SW) Anggota 3. Penyelenggaraan RAT 4. Rasio kehadiran anggota dalam RAT 5. (RK) dan (RAPB) Koperasi 6. Rasio peningkatan jumlah Anggota 7. Pendidikan dan pelatihan Bagi anggota 8. Pendidikan dan Pelatihan bagi pengelola koperasi 9. Tersedia anggaran dan Penyisihan dana pendidikan 10. Pemeriksaan	3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
			31
2.	Tatalaksana dan Manajemen	1. Rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota 2. Realisasi anggaran pendapatan koperasi 3. Realisasi anggaran belanja koperasi 4. Realisasi hasil usaha koperasi 5. Keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota 6. Penerangan dan penyuluhan 7. Media informasi 8. Sarana kantor dan usaha koperasi	3 3 3 3 3 3 3 3
			24
3.	Produktivitas	1. Rentabilitas modal sendiri 2. <i>Return On Asset (ROA)</i> 3. <i>Asset Turn Over (ATO)</i> 4. Kemampuan menghasilkan laba (<i>net profit margin</i>) 5. <i>Current Ratio</i> (Rasio Lancar) 6. Rasio Hutang (kewajiban) terhadap Total Aktiva 7. Rasio Hutang (kewajiban) terhadap Modal Sendiri 8. Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota 9. Perputaran piutang	3 3 3 3 3 3 3 3 3
			27
4.	Manfaat dan Dampak	1. Kerjasama usaha secara vertikal 2. Kerjasama usaha secara horizontal 3. Kerjasama usaha dengan badan usaha (BU) lainnya 4. Manfaat kerjasama 5. Penyerapan tenaga kerja 6. Pembayaran pajak, cukai/ retribusi 7. Dana sosial	3 3 2 3 2 2 3
			18
JUMLAH			100

Sumber : Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2006

Lampiran 4. Neraca per 31 Desember 2010 KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

NERACA PER 31 DESEMBER 2010
KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

No.	Uraian	31 Desember 2010	No.	Uraian	31 Desember 2010
I	Aktiva Lancar		IV	Kewajiban Jangka Pendek	
1.1	Kas	Rp. 71.448.581	4.1	Hutang bank	Rp. 67.612.500
1.2	Bank	Rp. 27.479.315	4.2	Hutang simpanan anggota	Rp. 16.695.426
1.3	Piutang Anggota	Rp. 94.412.876	4.3	Hutang dana-dana	Rp. 27.103.370
1.4	Piutang Non Anggota	Rp. 53.447.850		Jumlah kewajiban jangka pendek	Rp. 111.411.296
1.5	Penyusutan Piutang tak Tertagih	(Rp. 9.925.656)			
	Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 236.862.966			
II	Penyertaan		V	Kewajiban jangka panjang	
2.1	Simpana pada PUSKUD	Rp. 1.221.030	5.1	Hutang Bulog	Rp. 27.000.000
2.2	Simpanan pada Inkud	Rp. 124.083	5.2	Hutang Bukopin	Rp. 32.278.656
2.3	Simpanan pada Bukopin	Rp. 10.000.000		Jumlah kewajiban jangka panjang	Rp. 59.278.656
	Jumlah Penyertaan	Rp. 11.345.113		Total kewajiban	Rp. 170.689.952
III	Aktiva Tetap		VI	Ekuitas	
3.1	Tanah	Rp. 11.569.550	6.1	Simpanan pokok	Rp. 4.367.300
3.2	Bangunan Kantor	Rp. 46.676.775	6.2	Simpanan wajib	Rp. 21.161.286
3.3	Bangunan RMU	Rp. 2.026.300	6.3	Donasi	Rp. 195.551.584
3.4	Bangunan Gudang RMU	Rp. 14.679.500	6.4	Cadangan	Rp. 35.006.335
3.5	Mesin	Rp. 124.902.640		Jumlah Ekuitas	Rp. 256.086.505
3.6	Lantai Jemur	Rp. 31.299.075			
3.7	Perlengkapan	Rp. 1.670.000	VII	SHU tahun 2010	Rp. 8.309.105
3.8	Inventaris Kantor	Rp. 41.088.950			
	Harga Perolehan	Rp. 273.912.790			
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(Rp. 87.035.307)			
	Jumlah Aktiva Tetap	Rp. 186.877.483			
	Total Aktiva	Rp. 435.085.562		Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 435.085.562

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010

Lampiran 5. Laporan Laba/Rugi KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Perhitungan Laba / Rugi Per Desember 2010
KUD Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

No.	Perkiraan	Unit usaha simpan pinjam	Unit usaha RMU	Unit usaha Penagihan Rekening Listrik dan PDAM	Total
I	Pendapatan Operasional				
1.1	Pendapatan jasa	Rp. 15. 625. 300	Rp. 49. 725. 000	Rp. 20. 443. 000	Rp. 85. 793. 300
1.2	Pendapatan denda	-	-	Rp. 11. 037. 227	Rp. 11. 037. 227
1.3	Pendapatan lain-lain	Rp. 1. 689. 000	-	Rp. 14. 411. 213	Rp. 16. 100. 213
	Harga pokok penjualan	Rp. 17. 314. 300	Rp. 49. 725. 000	Rp. 45. 891. 440	Rp. 112. 930. 740
II	Biaya Operasional				
2.1	Gaji dan upah	Rp. 1. 201. 100	Rp. 13. 787. 400	Rp. 12. 554. 050	Rp. 27. 542. 550
2.2	Kelancaran usaha	Rp. 65.000	-	Rp. 1. 859. 000	Rp. 1. 924. 000
2.3	Bahan kemasan	-	Rp. 281. 000	-	Rp. 281. 000
2.4	Bahan bakar dan transportasi	-	Rp. 7. 690. 000	Rp. 270. 000	Rp. 7. 960. 000
2.5	Oil	-	Rp. 1. 000. 000	-	Rp. 1. 000. 000
2.6	Roberoll	-	Rp. 7. 253. 000	-	Rp. 7. 253. 000
2.7	Pemeliharaan	-	Rp. 325. 000	-	Rp. 325. 000
2.8	Sumbangan ke kantor Walinagari Selayo	-	-	Rp. 2. 400. 000	Rp. 2. 400. 000
2.9	Beban registrasi pos	-	-	Rp. 500.000	Rp. 500.000
2.10	Pajak, retribusi	-	Rp. 178. 000	-	Rp. 178. 000
2.11	Beban rek. Telepon,speeddy	-	-	Rp. 3. 566. 113	Rp. 3. 566. 113
	Jumlah biaya operasional	Rp. 1. 266. 100	Rp. 30. 514. 400	Rp. 21. 149. 163	(Rp. 52. 929. 663)
	Jumlah Laba operasional	Rp. 16. 048. 200	Rp. 19. 210. 600	Rp. 24. 742. 277	Rp. 60. 001. 007
III	Jumlah Biaya Organisasi				(Rp. 52. 514. 220)
					Rp. 7. 486. 857
IV	Pendapatan bunga bank BRI dan BPD				Rp. 822. 248
	SHU tahun 2010				Rp. 8. 309. 105

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010

Lampiran 6. Rencana dan Realisasi Anggaran Biaya, Pendapatan dan SHU KUD Setia Tahun 2010

No.	Keterangan	Rencana	Realisasi
1.	Pendapatan		
	a. Unit Usaha Simpan Pinjam	Rp 12.750.000	Rp 17.314.300
	b. Unit Usaha RMU	Rp 71.500.000	Rp 49.725.000
	c. Unit Usaha Penagihan Rekening Listrik dan PDAM	Rp 21.500.000	Rp 45.891.440
	Total Pendapatan	Rp 105.750.000	Rp 112.930.740
2.	Biaya Usaha		
	a. Unit Usaha Simpan Pinjam	Rp 1.000.000	Rp 1.266.100
	b. Unit Usaha RMU	Rp 37.240.000	Rp 30.514.400
	c. Unit Usaha Penagihan Rekening Listrik dan PDAM	Rp 13.640.000	Rp 21.149.163
	Jumlah Biaya Usaha	Rp 51.880.000	Rp 52.929.663
	Jumlah Biaya Organisasi	Rp 47.175.000	Rp 52.514.220
	Total Biaya	Rp 99.055.000	Rp 105.443.883
3.	Total Laba	Rp 6.695.000	Rp 7.486.857
4.	Pendapatan Bunga Bank		Rp 8.22.248
5.	SHU	Rp 6.695.000	Rp 8.309.105

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010

NO.	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL YANG DIAMATI	METODE PENGUMPULAN DATA	JENIS DATA	ANALISIS DATA
1.	Mengukur Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	<p>Gambaran umum koperasi, Sejarah Berdiri Koperasi Struktur Organisasi Struktur Permodalan Unit Usaha yang dijalankan</p> <p>Analisis kinerja KUD</p> <p>1. Aspek Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelunasan Simpanan Pokok (SP) anggota Pelunasan Simpanan Wajib (SW) anggota Penyelenggaraan RAT Rasio kehadiran anggota dalam RAT Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi Rasio peningkatan jumlah Anggota Pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi Tersedia anggaran khusus dan Penyisihan dana pendidikan Pemeriksaan oleh badan pengawas dan KAP <p>2. Aspek Tatalaksana dan Manajemen</p> <ol style="list-style-type: none"> Rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota Realisasi anggaran pendapatan koperasi Realisasi anggaran belanja koperasi Realisasi surplus hasil usaha koperasi Keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota Penerangan dan penyuluhan Media informasi Sarana kantor dan usaha koperasi <p>3. Aspek Produktivitas</p> <ol style="list-style-type: none"> Rentabilitas modal sendiri Return On Asset (ROA) Asset Turn Over (ATO) 	<p>Wawancara dengan pengurus, karyawan dan pengawas Dokumentasi KUD Setia</p> <p>Dokumentasi KUD Setia dan wawancara dengan pengurus</p> <p>Dokumentasi KUD Setia dan wawancara dengan pengurus</p> <p>Dokumentasi KUD Setia</p>	<p>Data sekunder dan data primer</p> <p>Data sekunder dan data primer</p> <p>Data primer dan data sekunder</p> <p>Data sekunder</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Kuantitatif</p> <p>Kuantitatif</p> <p>Kuantitatif</p>

		<ul style="list-style-type: none"> d. Kemampuan menghasilkan laba (<i>net profit margin</i>) e. <i>Current Ratio</i> f. Total hutang (kewajiban) terhadap asset g. Total hutang (kewajiban) terhadap modal sendiri h. Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota i. Perputaran piutang 			
		<p>4. Aspek Manfaat dan Dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama usaha secara vertikal b. Kerjasama usaha secara horizontal c. Kerjasama usaha dengan badan usaha (BU) lainnya d. Manfaat kerjasama e. Penyerapan tenaga kerja f. Pembayaran pajak, cukai/ retribusi g. Dana sosial 	Wawancara dengan pengurus	Data primer	Deskriptif
2.	Mendeskripsikan kepuasan anggota KUD Setia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Administrasi koperasi, meliputi kemudahan proses menjadi anggota, pencatatan data anggota oleh koperasi dan pelaksanaan Rapat Anggota 2. Etos kerja/ budaya kerja pengurus, meliputi keramahan pengurus melayani anggota, kecepatan menanggapi keluhan, ketepatan menanggapi keluhan, dan penampilan (kerapian) pengurus 3. Keuangan koperasi meliputi Sisa Hasil Usaha untuk anggota 4. Usaha simpan pinjam, meliputi prosedur memperoleh kredit, ketepatan waktu memperoleh kredit, ketepatan jumlah dalam memperoleh kredit dan tingkat suku bunga yang ditetapkan 5. Usaha RMU, meliputi biaya yang dikeluarkan jika menggunakan RMU di KUD, kualitas/ mutu beras yang dihasilkan dan jam operasional unit usaha RMU 6. Usaha penagihan rekening listrik dan PDAM yaitu manfaat yang diperoleh dengan adanya unit usaha penagihan rekening listrik dan PDAM 	wawancara dengan anggota KUD yang menjadi responden, dengan menggunakan kuisioner	Data primer	Deskriptif

Lampiran 8. Saldo Donasi yang diterima KUD Setia per 31 Desember 2010

No.	Keterangan	Donasi
1.	Bantuan Inkud Jakarta	Rp 10.074.084
2.	Bantuan Kanwil Koperindag Kota Padang	Rp 50.000.000
3.	Kenedy Round	Rp 110.000.000
4.	Bantuan BKD Provinsi Sumatera Barat	Rp. 25.477.500
Jumlah Donasi		Rp. 195.551.584

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010



Lampiran 9. Biaya Organisasi KUD Setia Tahun 2009 dan 2010

No.	Biaya Organisasi	Tahun	
		2009	2010
1.	Gaji Pengurus	Rp 5.400.000	Rp 4.800.000
2.	Biaya Pemeriksaan oleh Badan Pengawas	Rp 300.000	Rp 500.000
3.	Gaji Juru Buku/ Akuntan	Rp 5.400.000	Rp 6.000.000
4.	Gaji Kasir	Rp 5.400.000	Rp 6.000.000
5.	Alat Tulis Kantor	Rp 876.500	Rp 1.846.500
6.	Transportasi	Rp 275.000	Rp 400.000
7.	Konsumsi	Rp 131.500	Rp 310.000
8.	Beban Sewa (PBB)	Rp 5.496.500	Rp 6.852.960
9.	Rekening Listrik Air dan Telepon	Rp 1.920.804	Rp 1.577.522
10.	Dana Sosial	Rp 573.000	Rp 110.000
11.	Rapat Pengurus dan RAT	Rp 1.636.250	Rp 2.230.000
12.	Penyusutan Aktiva Tetap (Peralatan)	Rp 6.984.400	Rp 7.291.299
13.	Tunjangan Hari Raya	Rp 5.425.000	Rp 5.900.000
14.	Dana Taktis	Rp 218.000	-
15.	Dana Pendidikan	Rp 190.000	Rp 50.000
16.	Kebersihan	Rp 20.000	-
17.	Beban bunga BPD, Biaya polis asuransi BPD, Administrasi BPD, Profesi BPD, Biaya notaris kredit BPD dan Pajak kredit BPD	-	Rp 8.645.939
Jumlah Biaya Organisasi		Rp 40.246.954	Rp 52.514.220

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2009 - 2010



Lampiran 10 a. Perhitungan Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Organisasi Tahun 2010

Pelunasan SP Anggota

Simpanan Pokok (SP) Anggota KUD Setia Tahun 2010	Jumlah
Simpanan Pokok (SP) yang dibayar anggota	Rp. 4.367.300
Simpanan Pokok (SP) yang seharusnya lunas	Rp. 5.090.000

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010

Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah SP yang dibayar}}{\text{Jumlah SP yang seharusnya lunas}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 4.367.300}}{\text{Rp. 5.090.000}} \times 100\% = 85,80\%$$

Pelunasan SW Anggota

Simpanan Wajib (SW) Anggota KUD Setia Tahun 2010	Jumlah
Simpanan Wajib (SW) yang dibayar anggota	Rp. 21.161.286
Simpanan Wajib (SW) yang seharusnya lunas	Rp. 30.540.000

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010

Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah SW yang dibayar}}{\text{Jumlah SW yang seharusnya lunas}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 21.161.286}}{\text{Rp. 30.540.000}} \times 100\% = 69,29\%$$

Rasio Peningkatan Jumlah Anggota

Jumlah Anggota KUD Setia	Jumlah
Tahun 2010	172 orang
Tahun 2009	161 orang

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010

Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah anggota tahun 2010} - \text{jumlah anggota tahun 2009}}{\text{jumlah anggota tahun 2009}} \times 100\%$$

$$= \frac{(172) \text{ orang} - (161) \text{ orang}}{(161) \text{ orang}} \times 100\% = 6,83\%$$

Lampiran 10 b. Perhitungan Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Tatalaksana dan Manajemen Tahun 2010

Rasio Pencatatan Keanggotaan dalam Buku Daftar Anggota

Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah anggota tercatat}}{\text{Jumlah anggota seluruhnya}} \times 100\% = \frac{(172) \text{ orang}}{(172) \text{ orang}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi

Anggaran Pendapatan KUD Setia Tahun 2010	Jumlah
Rencana Anggaran Pendapatan	Rp. 105.750.000
Realisasi Anggaran Pendapatan	Rp. 112.930.740

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010

Perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Rencana Anggaran Pendapatan}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 112.930.740}}{\text{Rp. 105.750.000}} \times 100\% = 106,79\%$$

Realisasi Anggaran Belanja Koperasi

Anggaran belanja KUD Setia Tahun 2010	Jumlah
Rencana Anggaran Belanja	Rp. 99.055.000
Realisasi Anggaran Belanja	Rp. 105.443.883

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010

Perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Rencana Anggaran Belanja}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 105.443.883}}{\text{Rp. 99.055.000}} \times 100\% = 106,45\%$$

Realisasi Hasil Usaha Koperasi

Hasil Usaha KUD Setia Tahun 2010	Jumlah
Rencana Hasil Usaha	Rp. 6.695.000
Realisasi Hasil Usaha	Rp. 8.309.105

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010

Perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Hasil Usaha}}{\text{Rencana Hasil Usaha}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 8.309.105}}{\text{Rp. 6.695.000}} \times 100\% = 124,11\%$$

Keterkaitan Usaha Koperasi dengan Usaha Anggota

Perhitungan :

$$\frac{\text{Usaha yg dikelola koperasi terkait dgn usaha anggota}}{\text{Jumlah Usaha Koperasi}} \times 100\% = \frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\%$$

Lampiran 10 c. Perhitungan Kinerja KUD Setia berdasarkan Aspek Produktivitas Tahun 2010

Berdasarkan Lampiran 4 dan Lampiran 5, diketahui data sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Modal Sendiri Tahun 2010	Rp. 256. 086. 505
2	Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2010	Rp. 8. 309. 105
3	Aktiva lancar Tahun 2010	Rp. 236. 862. 966
4	Total aktiva Tahun 2010	Rp. 435. 085. 562
5	Passiva lancar (kewajiban jangka pendek) Tahun 2010	Rp. 111. 411. 296
6	Total Hutang Tahun 2010	Rp. 170. 689. 952
7	Penjualan Tahun 2010	Rp. 112. 930. 740

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010

Rentabilitas Modal Sendiri (*Return On Equity /ROE*)

Perhitungan :

$$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 8.309.105}}{\text{Rp. 256.086.505}} \times 100\% = 3,24\%$$

Return On Asset (ROA)

Perhitungan :

$$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Aktiva}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 8.309.105}}{\text{Rp. 435.085.562}} \times 100\% = 1,91\%$$

Asset Turn Over (ATO)

Perhitungan :

$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva}} \times 1 \text{ kali} = \frac{\text{Rp. 112.930.740}}{\text{Rp. 435.085.562}} \times 100\% = 0,26\%$$

Kemampuan Menghasilkan Laba (*Net Profit Margin*)

Perhitungan :

$$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 8.309.105}}{\text{Rp. 112.930.740}} \times 100\% = 7,36\%$$

Current Ratio (Rasio Lancar)

Perhitungan :

$$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Passiva Lancar}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 236.862.966}}{\text{Rp. 111.411.296}} \times 100\% = 212,60\%$$

Rasio Hutang terhadap Total Aktiva (RHTA)**Perhitungan :**

$$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 170. 689. 952}}{\text{Rp. 435. 085. 562}} \times 100\% = 39,23\%$$

Rasio Hutang terhadap Modal Sendiri (RHMS)**Perhitungan :**

$$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 170. 689. 952}}{\text{Rp. 256. 086. 505}} \times 100\% = 66,65\%$$

Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota

Uraian	Usaha Simpan Pinjam
Transaksi Anggota	Rp.108. 550. 000
Transaksi Seluruhnya	Rp.122. 550. 000

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010

Perhitungan :

$$\frac{\text{Transaksi anggota terhadap koperasi}}{\text{Total transaksi seluruhnya}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 108. 550. 000}}{\text{Rp. 122. 550. 000}} \times 100\% = 85,58\%$$

Perputaran piutang

Uraian	Piutang anggota	Piutang non anggota	Jumlah
Tahun 2009	Rp. 85. 755. 410	Rp. 43. 762. 360	Rp. 129. 517. 770
Tahun 2010	Rp. 94. 412. 876	Rp. 53. 447. 850	Rp. 147. 860. 726
Saldo piutang			Rp. 277. 378. 496

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Setia, 2010

Perhitungan :

$$\frac{\text{Penjualan}}{\frac{1}{2} \text{ saldo piutang (thn 2009 + thn 2010)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 112. 930. 740}}{\frac{1}{2} (\text{Rp. 277. 378. 496})} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 112. 930. 740}}{\text{Rp. 138.689.248}} \times 100\%$$

$$= 81,43\%$$

Lampiran 11. Koperasi Berprestasi di Kabupaten Solok Tahun 2011

No	Jenis Koperasi	Peringkat	Nama Koperasi	Nomor Badan Hukum	Tanggal Badan Hukum
1.	Koperasi Simpan Pinjam	I	KSP Talang Babungo	280.b/BH/XVII	10/10/1999
		II	KSP Kubang Gantung Ciri	02/BH/III.7/Koperindag/I/2007	1/22/2007
		III	KSP Mitra Karya	09/BH/III.7/Koperindag/IX/2007	11/23/2007
2.	Koperasi Konsumen	I	KPRI Kogussel	858/BH-XVII	5/9/1973
		II	KPRI SMPN 1 Bukit Sundi	2149/BH/XVII-1993	11/10/1993
		III	KPRI Bina Karya	301.a/BH-XVII	8/12/1982
3.	Koperasi Produsen	I	KUD Koto Baru	120/BH-XVII	9/5/1989
		II	Koptan Ternak Pematang Jaya	59/BH/KDK3.4/VI/99	6/9/1999
		III	KUD Setia Nagari Selayo	278.b/BH-XIII-12-67	3/28/1976
4.	Koperasi Jasa	I	KSU ED – Tabek	79/BH/KCK3.4/VIII/2000	8/14/2000
		II	KSP Nagari Siberambang	13/BH/Koperindag/V	5/30/2003
		III	KSP Sepakat Nagari Batu Bajanjang	25/BH/Koperindag/IV/07	4/5/2006
5.	Koperasi Pemasaran	I	KUD Manunggal	1507/BH-XVIII	5/25/1985
		II	Primkoppol Resort Solok	1022/BH-XVIII/1957	6/4/1975
		III	Primkopaddim 0309 Solok	1022/BH-XVIII	2/19/1975

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, 2011



Lampiran 12. Penilaian Kinerja KUD Setia oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Tahun 2010

No	Aspek Penilaian	Komponen Penilaian	Nilai
1.	Keaktifan Badan Usaha	a. Pelaksanaan RAT dan Rapat Pengurus/ Pengawas/ Karyawan	15
		b. Manajemen Pengawasan	3
		c. Keberadaan dan Tingkat Realisasi RK dan RAPB	10
		d. Rasio Kondisi Operasional, Kegiatan/Usaha	10
		e. Kinerja Kepengurusan	10
		f. Tertib Administrasi (Organisasi, Usaha dan Keuangan)	12
		g. Keberadaan Sistem Informasi	10
		h. Kemudahan mendapatkan Informasi	10
2.	Kinerja Usaha	a. Struktur Permodalan	15
		b. Tingkat Kesehatan Kondisi Keuangan	36
		c. Kemampuan bersaing Koperasi	12
		d. Strategi bersaing Koperasi	12
		e. Inovasi yang dilakukan	6
3.	Kohesivitas dan Partisipasi Anggota	a. Kohesivitas Anggota	10
		b. Rasio Peningkatan Jumlah Anggota	9
		c. Persentase Jumlah Anggota yang melunasi SW	15
		d. Persentase Besaran Simpanan selain SP dan SW	15
		e. Rasio Peningkatan Jumlah Penyertaan Modal Anggota	15
		f. Tingkat Pemanfaatan Pelayanan Koperasi oleh Anggota	15
		g. Pola Pengkaderan	12
4.	Orientasi Pelayanan Anggota	a. Pendidikan dan Pelatihan Anggota	14
		b. Keterkaitan Usaha Koperasi dengan Kepentingan Anggota	35
		c. Transaksi Usaha Koperasi dengan Transaksi Usaha Anggota	71
5.	Pelayanan Masyarakat	a. Pelayanan Usaha Koperasi yang dapat Dinikmati Masyarakat	4
		b. Persentase Besaran Dana yang Disisihkan untuk Pelayanan Sosial	3
		c. Kemudahan Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi Bisnis yang disebarkan Koperasi	3
		d. Tanggapan Masyarakat sekitar terhadap Keberadaan Koperasi	4
6.	Kontribusi Terhadap Pembangunan	a. Ketaatan Koperasi dalam Pembayaran Pajak	8
		b. Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja	1
		c. Tingkat Upah Karyawan	2
JUMLAH			397

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, 2011

Lampiran 13. Indikator Kepuasan Anggota KUD Setia

No.	Atribut	Skor	Indikator
1.	Proses Menjadi Anggota	1 2 3 4 5	Prosedur Rumit, Berbelit-belit dan Selesai Dalam Waktu Lebih Dari 2 Minggu Prosedur Rumit dan Selesai Dalam Waktu 1-2 Minggu Prosedur Wajar dan Selesai Dalam Waktu 3 Hari-1 Minggu Prosedur Mudah Diikuti dan Selesai Dalam Waktu 1-3 Hari Prosedur Mudah Diikuti dan Dapat Selesai Dalam Waktu 1 Hari
2.	Pencatatan Data Anggota oleh Koperasi	1 2 3 4 5	Tidak ada pencatatan sama sekali Pencatatan hanya sebagian dan data tidak dapat diketahui anggota Ada pencatatan tetapi tidak semua data dapat diketahui anggota Ada pencatatan tetapi data dapat diketahui anggota pada waktu tertentu saja Semua tercatat dengan baik dan data dapat diketahui oleh anggota setiap saat
3.	Pelaksanaan Rapat Anggota	1 2 3 4 5	Tidak pernah ada rapat anggota Tidak pernah ada rapat anggota dalam waktu 2 tahun terakhir Dilakukan minimal 1 kali 1 tahun Dilakukan tidak lebih dari 2 kali dalam 1 tahun Dilakukan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun
4.	Keramahan Pengurus	1 2 3 4 5	Ketus Hanya diam, menunggu untuk diajak berbicara Mengucapkan Salam Mengucapkan salam dan senyum Mengucapkan salam, senyum dan antusias melayani anggota
5.	Kecepatan Saat Menanggapi Keluhan	1 2 3 4 5	Menanggapi setelah 3 hari Menanggapi setelah 1 hari Menunggu sesaat, tetapi tetap ditanggapi dalam hari yang sama Langsung beraksi saat ada laporan keluhan Proaktif menanggapi keluhan
6.	Ketepatan Menanggapi Keluhan	1 2 3 4 5	Tanggapan tidak sesuai dengan keluhan, hasilnya berdampak buruk Tanggapan tidak sesuai dengan keluhan Tanggapan sesuai dengan keluhan Tanggapan sesuai dengan keluhan, hasilnya memuaskan Tanggapan sesuai dengan keluhan, hasilnya dirasa sangat memuaskan
7.	Penampilan/Kerapian Pengurus	1 2 3 4 5	Tidak memakai seragam dan tidak memakai sepatu Tidak memakai seragam, tetapi masih memakai sepatu Memakai Seragam Memakai seragam dan memakai sepatu Memakai seragam, tubuh wangi dan memakai sepatu
8.	Sisa Hasil Usaha (SHU)	1 2 3 4 5	Tidak pernah dibagikan lebih dari 2 tahun terakhir Tidak pernah dibagikan dalam 2 tahun terakhir SHU selalu dibagikan setiap akhir tahun buku SHU dibagikan setiap akhir tahun buku dengan jumlah relatif tinggi SHU relatif sedang dan rutin diberikan setiap tahun buku

9.	Prosedur memperoleh kredit	1 2 3 4 5	Prosedur Rumit, Berbelit-belit dan Selesai Dalam Waktu Lebih Dari 2 Minggu Prosedur Rumit dan Selesai Dalam Waktu 1-2 Minggu Prosedur Wajar dan Selesai Dalam Waktu 3 Hari-1 Minggu Prosedur Mudah Diikuti dan Selesai Dalam Waktu 1-3 Hari Prosedur Mudah Diikuti dan Dapat Selesai Dalam Waktu 1 Hari
10.	Waktu dalam memperoleh kredit	1 2 3 4 5	Menunggu lebih dari 1 minggu Menunggu 3 hari sampai 1 minggu Menunggu 1-3 hari Menunggu paling lama 1 hari Selalu ada saat dibutuhkan
11.	Jumlah kredit yang diterima	1 2 3 4 5	Tidak tersedia sama sekali Kadang-kadang tersedia Tersedia maksimal 10 juta dan dapat memenuhi kebutuhan Tersedia 10 juta – 20 juta dan dapat memenuhi kebutuhan Selalu tersedia,berapapun kebutuhan dapat dipenuhi
12.	Tingkat suku bunga pinjaman yang ditetapkan	1 2 3 4 5	Jika suku bunga sangat tinggi daripada ditempat lain Jika tingkat suku bunga sedikit lebih tinggi daripada di tempat lain Jika tingkat suku bunga sama dengan di tempat lain Jika tingkat suku bunga sedikit lebih rendah daripada di tempat lain Jika tingkat suku bunga jauh lebih rendah daripada di tempat lain
13.	Biaya yang dikeluarkan jika menggunakan RMU di KUD	1 2 3 4 5	Jika biaya yang dikeluarkan sangat mahal dari tempat lain Jika biaya yang dikeluarkan sedikit lebih mahal dari tempat lain Jika biaya yang dikeluarkan sama dengan di tempat lain Jika biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada di tempat lain Tanpa dipungut biaya
14	Mutu beras yang dihasilkan	1 2 3 4 5	Beras busuk, berpasir, tercemar benda asing dan dihindangi hama Beras berhama, tercemar benda asing dan berpasir Beras tidak berpasir Beras tidak berhama dan tidak berpasir Beras tidak busuk, tidak berpasir, tidak tercemar benda asing dan tidak dihindangi hama
15.	Jam kerja unit usaha RMU	1 2 3 4 5	Tidak pernah buka Kadang-kadang buka Buka pada hari kerja KUD saja Buka pada hari kerja KUD dan memulai kegiatan tepat waktu Selalu buka tiap hari dan memulai kegiatan tepat waktu
16.	Manfaat dari unit penagihan rekening listrik dan PDAM pada KUD	1 2 3 4 5	Tidak bermanfaat Kadang-kadang bermanfaat Merasakan manfaat karena proses pembayaran lancar Merasakan manfaat karena lokasinya dekat Merasakan manfaat karena proses pembayaran lancar dan lokasinya dekat

Lampiran 14. Identitas Responden Penelitian

No.Responden	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	42	Perempuan	SMA	Rumah Tangga
2.	32	Perempuan	Sarjana	PNS
3.	42	Laki-laki	Diploma	PNS
4.	48	Laki-laki	Sarjana	PNS
5.	57	Laki-laki	SD	Petani
6.	34	Perempuan	SMA	Rumah Tangga
7.	45	Perempuan	SMA	Rumah Tangga
8.	54	Laki-laki	SD	Petani
9.	48	Perempuan	SD	Petani
10.	49	Laki-laki	SMP	Petani
11.	55	Perempuan	SMP	Petani
12.	53	Perempuan	SD	Petani
13.	50	Laki-laki	SD	Petani
14.	39	Perempuan	SD	Petani
15.	44	Perempuan	SMP	Petani
16.	48	Laki-laki	SD	Petani
17.	53	Laki-laki	SMP	Petani
18.	59	Perempuan	SD	Petani
19.	43	Perempuan	SMA	Rumah Tangga
20.	39	Perempuan	SMA	Wiraswasta
21.	43	Laki-laki	Sarjana	PNS
22.	40	Perempuan	SMP	Wiraswasta
23.	55	Perempuan	SD	Wiraswasta
24.	33	Perempuan	SD	Wiraswasta
25.	41	Perempuan	SMA	Wiraswasta
26.	43	Laki-laki	SMP	Wiraswasta
27.	39	Perempuan	Sarjana	PNS
28.	50	Laki-laki	SD	Petani
29.	40	Laki-laki	SMP	Wiraswasta
30.	35	Perempuan	SMA	Wiraswasta
31.	37	Perempuan	SMA	Rumah Tangga
32.	36	Perempuan	SMA	Wiraswasta
33.	49	Laki-laki	SD	Wiraswasta
34.	34	Perempuan	SMA	Rumah Tangga